



# **LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LKjPD)**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melaporkan pencapaian kinerjanya secara transparan dan terukur.

Secara garis besar, laporan ini menyajikan capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, meliputi efektivitas pengelolaan APBD, optimalisasi penatausahaan aset daerah, serta peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Hasil yang dicapai sepanjang TA 2025 merupakan refleksi dari komitmen seluruh jajaran BPPKAD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*). Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan daerah di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kerja BPPKAD TA 2025. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Probolinggo, 28 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19730215 199302 2 002



## DAFTAR ISI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| KATA PENGANTAR ..... | i   |
| DAFTAR ISI .....     | ii  |
| DAFTAR TABEL .....   | iii |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....                                         | 1  |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                      | 31 |
| 1.3 Landasan Hukum .....                                         | 31 |
| 1.4 Permasalahan Utama berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD ..... | 32 |

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Perencanaan Strategis .....                       | 37 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....               | 41 |
| 2.3 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan.....         | 48 |
| 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....               | 56 |
| 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025..... | 58 |

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                                      | 60  |
| 3.2 Realisasi Anggaran.....                                               | 81  |
| 3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPPKAD<br>tahun 2024 ..... | 84  |
| 3.4 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumberdaya .....                 | 99  |
| 3.5 Inovasi .....                                                         | 102 |
| 3.6 Penghargaan .....                                                     | 106 |

## BAB IV : PENUTUP

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 109 |
| 4.2 Saran .....     | 109 |

## LAMPIRAN

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1 Perjanjian Kinerja.....                 | 111 |
| 2 Penetapan Definisi Operasional IKU..... | 115 |
| 3 Rencana Aksi.....                       | 117 |
| 4 Bukti Perhitungan IKU.....              | 135 |

**DAFTAR TABEL**

|            |                                                                                          |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 1.1  | Total Pegawai BPPKAD .....                                                               | 18 |
| TABEL 1.2  | Total Pegawai BPPKAD menurut Eselonisasi .....                                           | 19 |
| TABEL 1.3  | Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal .....                                   | 19 |
| TABEL 1.4  | Pegawai Menurut Golongan Ruang .....                                                     | 20 |
| TABEL 1.5  | Kebutuhan Pegawai Menurut Jabatan.....                                                   | 20 |
| TABEL 1.6  | Kebutuhan Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....                                            | 22 |
| TABEL 1.7  | Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPPKAD.....                                              | 33 |
| TABEL 2.1. | Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Tahun 2025 .....                                    | 42 |
| TABEL 2.2  | Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan<br>BPPKAD Tahun 2025 .....         | 48 |
| TABEL 2.3  | Rencana Kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo<br>Tahun 2025.....                          | 57 |
| TABEL 2.5  | Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo<br>Tahun 2025.....                       | 59 |
| TABEL 3.1  | Skala Nilai Peringkat Daerah .....                                                       | 60 |
| TABEL 3.2  | Capaian Indikator Kinerja Utama.....                                                     | 61 |
| TABEL 3.3  | Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2025 .....                               | 66 |
| TABEL 3.4  | Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dengan terget akhir<br>Renstra 2025-2029 ..... | 69 |
| TABEL 3.5  | Penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja .....                             | 73 |
| TABEL 3.6  | Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan/Sub Kegiatan<br>Tahun 2025.....               | 81 |
| TABEL 3.7  | Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan BPPKAD<br>s.d. Desember 2025.....             | 84 |
| TABEL 3.8  | Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya .....                                   | 99 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

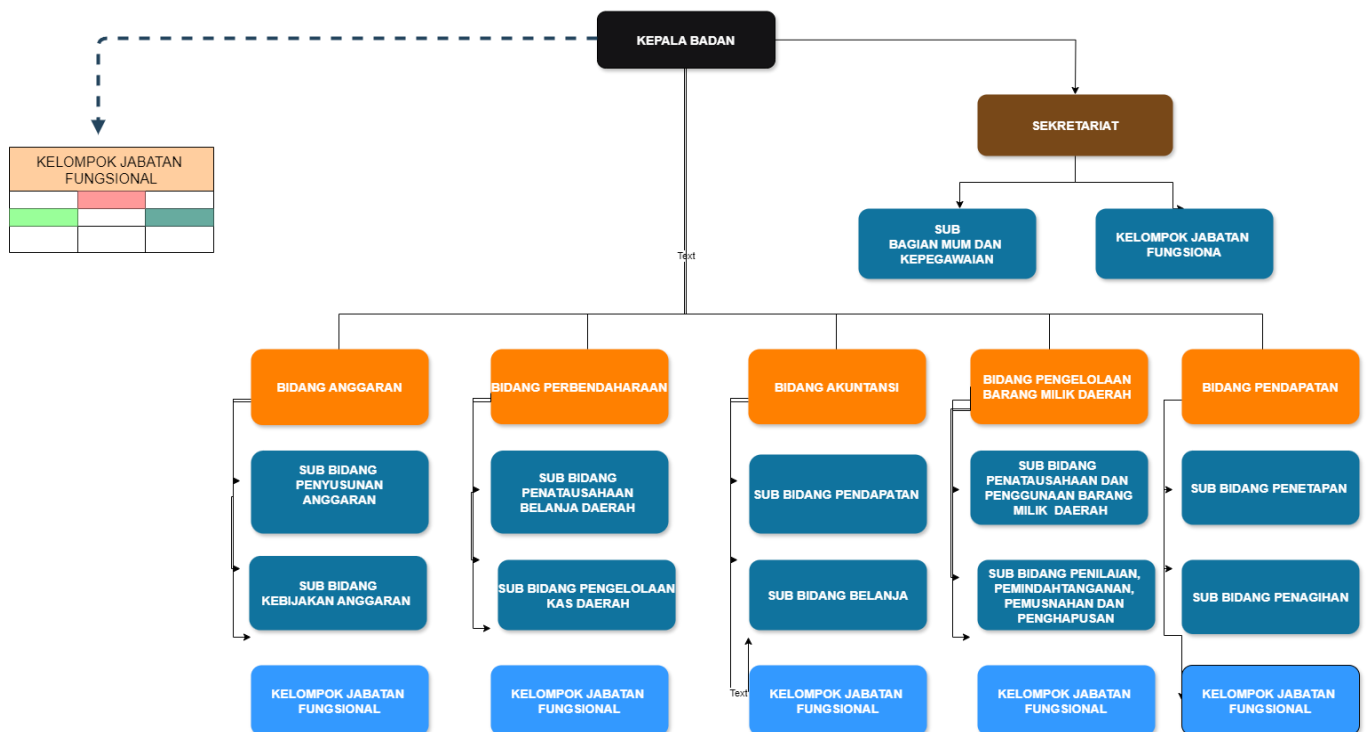
Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kinerja instansi pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Pemerintah sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjPD) pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD sesuai dengan Perbup Nomor 14 Tahun 2022 BPPKAD tentang tugas pokok dan fungsi BPPKAD. Dalam pencapaian tujuan serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemda di masa mendatang.. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan sebanyak 99 Orang. Berikut uraian tugas pokok dan fungsi BPPKAD dan rincian sumber daya manusia (SDM) di dalamnya pada Tahun Anggaran 2025 ;

**a. SOTK Tusi sesuai dengan Perbup 14/2022**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 76 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), melaksanakan urusan pemerintahan bidang "Keuangan". Kemudian diturunkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa BPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai berikut :





## **Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi antara lain:

### **Fungsi**

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Adapun Uraian Tupoksi Bidang-bidang pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :**

#### **❖ Sekretaris :**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
  - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
  - e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;



- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
  - b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
  - d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
  - e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;



- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **Bidang Anggaran ;**

- (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran;
  - b. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran;
  - c. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Anggaran;
  - d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
  - e. pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan SKPKD;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Anggaran;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran daerah. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :



- a. Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi, serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;
  - b. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;
  - c. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan perubahannya;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi antara lain :
- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pendapatan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran belanja daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pembiayaan;
  - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)– Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - e. Pelaksanaan penyusunan naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);



- f. Pelaksanaan koordinasi persiapan proses kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah;
  - b. Penyusunan pedoman Standar Harga Satuan (SHS), Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), RKA-SKPD;
  - c. Pembinaan penganggaran daerah atas kebijakan teknis dan peraturan teknis yang diterbitkan;
  - d. Pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

❖ **Bidang Perbendaharaan ;**

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan kegiatan perbendaharaan;
  - b. pengendalian atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - c. pengendalian pengelolaan Gaji ASN;
  - d. pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
  - e. pembinaan pengelolaan kas daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau lembaga terkait perbendaharaan;
  - g. perumusan dan penyusunan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
  - h. perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan implementasi SIPD;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan



Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja sub bidang penatausahaan belanja daerah;
  - b. Pelaksanaan pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  - d. Pelaporan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  - e. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - f. Pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - g. Pengelolaan data gaji ASN;
  - h. Pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Pihak Ketiga (PFK) Non Pajak Pusat atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  - b. Penyiapan ketersediaan kas daerah;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - d. Pemrosesan penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
  - e. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD sesuai dengan dokumen SP2D;



- f. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan kembali pemberian pinjaman;
  - g. Pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk;
  - h. Pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Pihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat yang disetor ke RKUN;
  - i. Pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;
  - j. Pelaksanaan pengelolaan utang piutang pada Bendahara Umum Daerah dan koreksi kas daerah;
  - k. Penatausahaan pinjaman daerah dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah;
  - l. Penatausahaan dana cadangan pemerintah daerah;
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Pengendalian belanja daerah;
  - b. Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas Pemerintah Daerah dan pagu pada APBD;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;
  - d. Pemeriksaan keabsahan Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapannya;
  - e. Perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - f. Pembinaan penatausahaan dan SIPD Keuangan Daerah;
  - g. Perumusan dan pemanfaatan SIPD Keuangan Daerah;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

❖ **Bidang Akuntansi ;**

- (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;



- b. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi;
- c. pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan BLUD, dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Daerah;
- g. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan Sistem Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- j. pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang akuntansi;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
  - b. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;



- c. Pelaksanaan kebijakan dan sistim akuntansi pendapatan daerah serta kebijakan dan sistem akuntansi selain kas;
  - d. Pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
  - e. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - f. Pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas umum daerah;
  - g. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
  - h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas;
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi belanja daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi :
- a. Pelaksananan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - b. Pelaksananan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah dengan rekening Kas Umum Daerah;
  - c. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
  - d. Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;



- e. Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - f. Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - g. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
  - h. Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
  - i. Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - j. Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
  - b. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
  - f. Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - g. Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;



- h. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawabn pelaksanaan APBD;
- i. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. Pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
- k. Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

❖ **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - b. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
  - c. perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - d. perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  - f. pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
  - g. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
  - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalia pengelolaan barang milik daerah;
  - i. pelaksanaan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
  - j. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
  - k. pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;



- l. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - b. Pengumpulan Bahan Dan Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - d. Pelaksanaan Desk, Evaluasi Dan Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Organisasi Perangkat Daerah;
  - e. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - f. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
  - g. Pelaksanaan Penerimaan Dan Pencatatan Barang Milik Daerah;
  - h. Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Organisasi Perangkat Daerah;
  - i. Pelaksanaan Pembinaan Barang Milik Daerah Organisasi Perangkat Daerah;
  - j. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset;
- b. Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset;
- c. Penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset;
- d. Penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
- f. Penyiapan bahan dan data proses penilaian Barang Milik Daerah;
- g. Penyiapan bahan dan data proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- h. Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan Barang Milik Daerah;
- i. Penyiapan bahan dan data proses penghapusan Barang Milik Daerah;
- j. Penyiapan bahan dan data proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Daerah;
- k. Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- m. Pelaksanaan pembinaan Barang Milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- b. Pengumpulan data pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik daerah;
- c. Pelaksanakan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan pengamanan barang Milik Daerah;
- e. Pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan asuransi gedung dan kendaraan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;



- h. Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

❖ **Bidang Pendapatan**

- (1) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
  - b. Pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
  - d. Pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah;
  - e. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
  - f. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah;
  - g. Pelaksanaan, pengawasan dan penindakan penerimaan/pendapatan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh :

- 1. Kepala Sub Bidang Penetapan. Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penetapan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan, penetapan pendapatan daerah;
  - b. Penyiapan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;
  - c. Penyiapan surat ketetapan pajak daerah;
  - d. Pemrosesan dan menyampaikan surat ketetapan pajak daerah;
  - e. Pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi surat ketetapan pajak daerah;
  - f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah;
  - g. Pelaksanaan analisis kebijakan pajak daerah;
  - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;



- i. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
  - j. Penginventarisasian, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pajak daerah;
  - k. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Penagihan. Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
  - b. Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;
  - c. Penyiapan usulan penghapusan piutang pajak;
  - d. Penyiapan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
  - f. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
  - g. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah;
  - h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan;
  - b. Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek dan subjek pajak daerah;



- d. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- e. Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- g. Pelaksanaan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendapatan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) BPPKAD berjumlah total 99 karyawan/karyawati dengan status PNS berjumlah 66 orang, tenaga CPNS berjumlah 6 orang, PPPK 2 orang dan PPPK paruh waktu 25 orang. Berikut Pegawai BPPKAD dapat ditinjau dari klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Total Pegawai BPPKAD

| NO | KEPEGAWAIAN      | Jumlah (org) |
|----|------------------|--------------|
| 1  | PNS              | 66           |
| 2  | CPNS             | 6            |
| 3  | PPPK             | 2            |
| 4  | PPPK Paruh Waktu | 25           |
|    | Jumlah           | 99           |

\*Sumber : Data kepegawaian BPPKAD 2025



Tabel 1.2  
Total Pegawai BPPKAD

| NO | Eselonisasi        | Jumlah (org) |
|----|--------------------|--------------|
| 1  | Eselon II          | 1            |
| 2  | Eselon III         | 6            |
| 3  | Eselon IV          | 11           |
| 4  | Pejabat fungsional | 4            |
| 5  | Staf ASN           | 52           |
| 6  | Staf Non ASN       | 25           |
|    | Jumlah             | 99           |

\*Sumber : Data kepegawaian BPPKAD 2025

Tabel 1.3  
Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal

| NO | Tingkat Pendidikan          | ASN | NON ASN) |
|----|-----------------------------|-----|----------|
| 1  | Sarjana S-2 (Pasca Sarjana) | 17  | 0        |
| 2  | Sarjana S-1 (Sarjana)       | 29  | 9        |
| 3  | Diploma 4 (Diploma 4)       | 1   | 0        |
| 4  | Diploma 3 (Diploma 3)       | 23  | 2        |
| 5  | Diploma 1 (Diploma 1)       | 0   | 0        |
| 6  | SLTA / Paket C              | 4   | 13       |
| 7  | SD                          | 0   | 1        |
|    | Jumlah                      | 74  | 25       |

\*Sumber : Data kepegawaian BPPKAD 2025



Tabel 1.4  
Pegawai menurut **Golongan/Ruang**

| NO | Golongan/Ruang                 | Jumlah (org) |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1  | Pembina Utama Madya (IV/c)     | 1            |
| 2  | Pembina Tingkat I (IV/b)       | 1            |
| 3  | Pembina (IV/a)                 | 5            |
| 4  | Penata Tingkat I (III/d)       | 11           |
| 5  | Penata (III/c)                 | 12           |
| 6  | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | 8            |
| 7  | Penata Muda (III/a)            | 10           |
| 8  | Pengatur Tingkat I (II/d)      | 2            |
| 9  | Pengatur (II/c)                | 22           |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 0            |
| 11 | Pengatur Muda (II/a)           | 0            |
| 12 | Golongan VII (PPPK)            | 2            |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>74</b>    |

\*Sumber : Data kepegawaian BPPKAD 2025

Tabel 1.5  
Kebutuhan Pegawai BPPKAD menurut **Jabatan**

| NO | Golongan/Ruang                                                             | Jumlah (org) |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | JF PERENCANA MADYA                                                         | 2            |
| 2  | JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MADYA                                  | 2            |
| 3  | ANALIS ASET DAERAH                                                         | 1            |
| 4  | ANALIS ASET DAERAH                                                         | 0            |
| 5  | ANALIS LAPORAN KEUANGAN                                                    | 1            |
| 6  | ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 0            |
| 7  | ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH                                          | 0            |



|    |                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------|----|
| 8  | ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN          | 2  |
| 9  | ANALIS PENAGIHAN PAJAK                           | 1  |
| 10 | ANALIS LAPORAN KEUANGAN                          | 1  |
| 11 | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN              | 1  |
| 12 | ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI                 | 3  |
| 13 | ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN                        | 1  |
| 14 | BENDAHARA                                        | 1  |
| 15 | JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA         | 3  |
| 16 | JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTAMA      | 0  |
| 17 | JF ARSIPARIS MAHIR / PELAKSANA LANJUTAN          | 1  |
| 18 | JF ARSIPARIS PENYELIA                            | 1  |
| 19 | JF ARSIPARIS TERAMPIL / PELAKSANA                | 1  |
| 20 | JF PENATA LAKSANA BARANG MAHIR                   | 1  |
| 21 | JF PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA                | 1  |
| 22 | JF PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL                | 1  |
| 23 | JF PERENCANA MUDA                                | 0  |
| 24 | JF PERENCANA PERTAMA                             | 1  |
| 25 | JF PRANATA KOMPUTER MAHIR                        | 10 |
| 26 | JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA                     | 10 |
| 27 | JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL                     | 9  |
| 28 | JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR    | 1  |
| 29 | JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA | 1  |
| 30 | JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL | 0  |
| 31 | JURU SITA                                        | 2  |
| 32 | PENAGIH RETRIBUSI                                | 4  |
| 33 | PENATA LAPORAN KEUANGAN                          | 4  |
| 34 | PENGADMINISTRASI ANGGARAN                        | 2  |



|    |                                                              |            |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 35 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN                                    | 3          |
| 36 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 3          |
| 37 | PENGADMINISTRASI UMUM                                        | 3          |
| 38 | PENGELOLA DATA                                               | 13         |
| 39 | PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN              | 0          |
| 40 | PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA                                | 1          |
| 41 | PENGELOLA GAJI                                               | 1          |
| 42 | PENGELOLA PAJAK DAERAH                                       | 1          |
| 43 | PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN                           | 0          |
| 44 | PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH      | 1          |
| 45 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR                        | 1          |
| 46 | PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN    | 1          |
| 47 | PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS                         | 0          |
| 48 | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN                      | 3          |
| 49 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN                       | 0          |
| 50 | VERIFIKATOR ANGGARAN                                         | 2          |
| 51 | VERIFIKATOR KEUANGAN                                         | 3          |
| 52 | VERIFIKATOR PAJAK                                            | 0          |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                | <b>105</b> |

Tabel 1.6  
Pegawai BPPKAD menurut Jenis Kelamin

| NO | Golongan/Ruang | Jumlah (org) |
|----|----------------|--------------|
| 1  | Laki laki      | 53           |
| 2  | Perempuan      | 46           |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>99</b>    |



### **C. Sarana/Prasarana (Aset)**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan Probolinggo (67282)  
Telepon (0335) 846651  
Laman bppkad.probolinggokab.go.id Pos-el bppkad@probolinggokab.go.id

Probolinggo, 6 Februari 2026

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah  
di  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 000.2.3.2/177/426.203/2026

| No. | Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan                         | Banyaknya   | Keterangan                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1.  | Laporan Barang Milik Daerah Semester II Tahun Anggaran 2025 | Enam Berkas | Untuk pemenuhan dokumen MCSP KPK 2026 |

Diterima tanggal 6 Februari 2026

Penerima  
Analisis Aset Daerah Bidang Pengelolaan  
BMD BPPKAD

Afin Pramana Oktavian, S.M.  
Penata Muda (III/a)  
NIP 199110262022031001

Pengirim  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pendapatan, Keuangan dan Aset  
Daerah,



Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197302151993022002

Nomor telepon 085216953255

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



FORMAT IV.L.2.2

**LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG**

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

**5.02.0.00.0.00.52.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah****52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah**

AKHIR TAHUN

TAHUN 2025

Kode Lokasi : 52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR

Kabupaten/ : KABUPATEN PROBOLINGGO

Kota

| Penggolongan dan Kodeifikasi Barang |                                      | Saldo Awal (Rp.)         | Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp) | Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp) | Saldo Akhir              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Kode Barang                         | Nama Barang                          |                          |                                 |                                 |                          |
| 1                                   | 2                                    | 3                        | 4                               | 5                               | 6                        |
| <b>1 3</b>                          | <b>ASET TETAP</b>                    | <b>50.062.038.658,17</b> | <b>5.958.320.979,00</b>         | <b>3.668.793.868,69</b>         | <b>52.351.565.768,48</b> |
| <b>1 3 1</b>                        | <b>TANAH</b>                         | <b>5.846.791.297,98</b>  | <b>938.263.600,00</b>           | <b>768.158.000,00</b>           | <b>6.016.896.897,98</b>  |
| 1 3 1 01                            | TANAH                                | 5.846.791.297,98         | 938.263.600,00                  | 768.158.000,00                  | 6.016.896.897,98         |
| <b>1 3 2</b>                        | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>           | <b>23.902.905.498,50</b> | <b>3.546.072.979,00</b>         | <b>2.144.954.400,00</b>         | <b>25.304.024.077,50</b> |
| 1 3 2 01                            | ALAT BESAR                           | 117.775.000,00           | -                               | 113.025.000,00                  | 4.750.000,00             |
| 1 3 2 02                            | ALAT ANGKUTAN                        | 11.189.042.115,00        | 2.033.313.500,00                | 1.896.885.500,00                | 11.325.470.115,00        |
| 1 3 2 03                            | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR           | 766.536.530,00           | 61.691.999,00                   | -                               | 828.228.529,00           |
| 1 3 2 04                            | ALAT PERTANIAN                       | 2.000.000,00             | -                               | -                               | 2.000.000,00             |
| 1 3 2 05                            | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA         | 4.903.361.145,50         | 1.210.863.480,00                | 135.043.900,00                  | 5.979.180.725,50         |
| 1 3 2 06                            | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 633.432.150,00           | -                               | -                               | 633.432.150,00           |
| 1 3 2 07                            | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN        | 97.460.000,00            | -                               | -                               | 97.460.000,00            |
| 1 3 2 08                            | ALAT LABORATORIUM                    | 30.058.000,00            | -                               | -                               | 30.058.000,00            |
| 1 3 2 10                            | KOMPUTER                             | 6.163.240.558,00         | 240.204.000,00                  | -                               | 6.403.444.558,00         |
| <b>1 3 3</b>                        | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>           | <b>19.529.852.913,69</b> | <b>1.473.984.400,00</b>         | <b>755.681.468,69</b>           | <b>20.248.155.845,00</b> |
| 1 3 3 01                            | BANGUNAN GEDUNG                      | 18.688.909.333,69        | 1.293.830.000,00                | 755.681.468,69                  | 19.227.057.865,00        |
| 1 3 3 02                            | MONUMEN                              | 134.952.000,00           | -                               | -                               | 134.952.000,00           |
| 1 3 3 04                            | TUGU TITIK KONTROL/PASTI             | 705.991.580,00           | 180.154.400,00                  | -                               | 886.145.980,00           |
| <b>1 3 4</b>                        | <b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>   | <b>726.163.948,00</b>    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>726.163.948,00</b>    |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



|   |   |   |    |                                                 |                      |   |   |                      |
|---|---|---|----|-------------------------------------------------|----------------------|---|---|----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 01 | JALAN DAN JEMBATAN                              | 174.014.000,00       | - | - | 174.014.000,00       |
| 1 | 3 | 4 | 02 | BANGUNAN AIR                                    | 529.674.948,00       | - | - | 529.674.948,00       |
| 1 | 3 | 4 | 03 | INSTALASI                                       | 2.500.000,00         | - | - | 2.500.000,00         |
| 1 | 3 | 4 | 04 | JARINGAN                                        | 19.975.000,00        | - | - | 19.975.000,00        |
| 1 | 3 | 5 |    | <b>ASET TETAP LAIN</b>                          | <b>56.325.000,00</b> | - | - | <b>56.325.000,00</b> |
| 1 | 3 | 5 | 01 | BAHAN PERPUSTAKAAN                              | 53.355.000,00        | - | - | 53.355.000,00        |
| 1 | 3 | 5 | 02 | BARANG BERCORAK<br>KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | 2.970.000,00         | - | - | 2.970.000,00         |
|   |   |   |    |                                                 |                      |   |   |                      |

Probolinggo, 6 Februari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,  
Keuangan dan Aset Daerah,Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197302151993022002Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



FORMAT IV.L.2.3

## REKAPITULASI LAPORAN ASET TETAP

MENURUT JENIS

INTRAKOMPTABEL

5.02.0.00.0.00.52.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

AKHIR TAHUN

TAHUN 2025

Kode Lokasi : 52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota : KABUPATEN PROBOLINGGO

| Penggolongan dan Kodefikasi Barang |                             | Jumlah | Saldo Akhir       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| Kode Barang                        | Nama Barang                 |        |                   |
| 1                                  | 2                           | 3      | 4                 |
| 1 3                                | ASET TETAP                  | 3.600  | 52.279.975.768,48 |
| 1 3 1                              | TANAH                       | 22     | 6.016.896.897,98  |
| 1 3 2                              | PERALATAN DAN MESIN         | 2.808  | 25.232.434.077,50 |
| 1 3 3                              | GEDUNG DAN BANGUNAN         | 412    | 20.248.155.845,00 |
| 1 3 4                              | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 6      | 726.163.948,00    |
| 1 3 5                              | ASET TETAP LAIN             | 352    | 56.325.000,00     |

Probolinggo, 6 Februari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,  
Keu-----t Daerah,Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197302151993022002Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



FORMAT IV.L.3.2

## LAPORAN ASET LAINNYA MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

5.02.0.00.0.00.52.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

AKHIR TAHUN

TAHUN 2025

Kode Lokasi : 52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah  
Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PROBOLINGGO

| Penggolongan dan Kodifikasi Barang |                     | Saldo Awal (Rp.) | Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp) | Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp) | Saldo Akhir       |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Kode Barang                        | Nama Barang         |                  |                                 |                                 |                   |
| 1                                  | 2                   | 3                | 4                               | 5                               | 6                 |
| 1 5                                | ASET LAINNYA        | 1.597.879.739,00 | 47.214.960.800,00               | -                               | 48.812.840.539,00 |
| 1 5 3                              | ASET TIDAK BERWUJUD | 1.365.245.739,00 | 49.500.000,00                   | -                               | 1.414.745.739,00  |
| 1 5 3 01                           | ASET TIDAK BERWUJUD | 1.365.245.739,00 | 49.500.000,00                   | -                               | 1.414.745.739,00  |
| 1 5 4                              | ASET LAIN-LAIN      | 232.634.000,00   | 47.165.460.800,00               | -                               | 47.398.094.800,00 |
| 1 5 4 01                           | ASET LAIN-LAIN      | 232.634.000,00   | 47.165.460.800,00               | -                               | 47.398.094.800,00 |

Probolinggo, 6 Februari 2026  
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,  
Keuangan dan Aset Daerah,



Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197302151993022002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



FORMAT IV.L.3.3

## REKAPITULASI LAPORAN ASET LAINNYA

MENURUT JENIS

INTRAKOMPTABEL

5.02.0.00.0.00.52.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah

AKHIR TAHUN

TAHUN 2025

Kode Lokasi : 52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah  
Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PROBOLINGGO

| Penggolongan dan Kodefikasi Barang |                     | Jumlah | Saldo Akhir       |
|------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Kode Barang                        | Nama Barang         |        |                   |
| 1                                  | 2                   | 3      | 4                 |
| 1 5                                | ASET LAINNYA        | 115    | 49.238.768.539,00 |
| 1 5 3                              | ASET TIDAK BERWUJUD | 22     | 1.840.673.739,00  |
| 1 5 4                              | ASET LAIN-LAIN      | 93     | 47.398.094.800,00 |

Probolinggo, 6 Februari 2026  
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,  
Keuangan dan Aset Daerah,



Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197302151993022002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



FORMAT IV.L.4.1

**REKAPITULASI MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG LAPORAN BMD**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**5.02.0.00.0.00.52.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah**  
**AKHIR TAHUN**  
**TAHUN 2025**

Kode Lokasi : 52.00.00 - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah  
Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR  
Kabupaten/ : KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kota :

| Penggolongan dan Kodeifikasi Barang |                             | Saldo Awal (Rp.)  | Mutasi Tambah (Rp.) | Mutasi Kurang (Rp.) | Saldo Akhir       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Kode Barang                         | Nama Barang                 |                   |                     |                     |                   |
| 1                                   | 2                           | 3                 | 4                   | 5                   | 6=3+4-5           |
| 1 1                                 | ASET LANCAR                 | -                 | 9.002.100,00        | -                   | 9.002.100,00      |
| 1 1 7                               | PERSEDIAAN                  | -                 | 9.002.100,00        | -                   | 9.002.100,00      |
| 1 3                                 | ASET TETAP                  | 50.062.038.658,17 | 5.958.320.979,00    | 3.668.793.868,69    | 52.351.565.768,48 |
| 1 3 1                               | TANAH                       | 5.846.791.297,98  | 938.263.800,00      | 768.158.000,00      | 6.016.896.897,98  |
| 1 3 2                               | PERALATAN DAN MESIN         | 23.902.905.498,50 | 3.546.072.979,00    | 2.144.954.400,00    | 25.304.024.077,50 |
| 1 3 3                               | GEDUNG DAN BANGUNAN         | 19.529.852.913,69 | 1.473.984.400,00    | 755.681.468,69      | 20.248.155.845,00 |
| 1 3 4                               | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 726.163.948,00    | -                   | -                   | 726.163.948,00    |
| 1 3 5                               | ASET TETAP LAIN             | 56.325.000,00     | -                   | -                   | 56.325.000,00     |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

|       |                     |                  |                   |   |                   |
|-------|---------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| 1 5   | ASET LAINNYA        | 2.716.551.308,00 | 47.214.960.800,00 | - | 49.931.512.108,00 |
| 1 5 3 | ASET TIDAK BERWUJUD | 2.483.917.308,00 | 49.500.000,00     | - | 2.533.417.308,00  |
| 1 5 4 | ASET LAIN-LAIN      | 232.634.000,00   | 47.165.460.800,00 | - | 47.398.094.800,00 |

Probolinggo, 6 Februari 2026  
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,  
Keuangan dan Aset Daerah,



Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategis pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

### **b. Tujuan**

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Sebagai bahan pertimbangan perbaikan berkesinambungan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja.
3. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
4. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## **1.3 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan LkjiP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
- m. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- n. Peraturan Bupati Probolinggo No. 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

#### **1.4 Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi**

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :



**Tabel 1.7**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo**

| <b>NO</b> | <b>Permasalahan<br/>(Masalah real yg terjadi di<br/>PD/Kec)</b>    | <b>Akar Masalah<br/>(Penyebab masalah)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Isu Strategis<br/>(Prioritas masalah yang<br/>perlu diselesaikan)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Arah Kebijakan<br/>(strategi penanganan masalah<br/>prioritas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Kurangnya keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya keselarasan antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dengan dokumen penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, APBD, DPA).</li> <li>2. Evaluasi dan pengendalian terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran belum berjalan optimal.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya integrasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja.</li> <li>2. Belum kuatnya sistem evaluasi dan pengendalian konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk mendukung akuntabilitas APBD.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi indikator, target, dan pagu anggaran dalam seluruh dokumen (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, APBD, DPA).</li> <li>2. Sinkronisasi tahapan perencanaan dan penganggaran secara sistematis.</li> <li>3. Penguatan koordinasi Bappeda dan BPPKAD dalam penyusunan dan verifikasi dokumen.</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan SIPD sebagai sistem integrasi perencanaan dan penganggaran.</li> <li>5. Penerapan prinsip money follow program dan outcome oriented budgeting.</li> </ol> |
| 2         | Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan Asli Daerah (PAD)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi PAD belum mencapai potensi riil yang dimiliki daerah.</li> <li>2. Basis data objek dan subjek pajak/retribusi</li> </ol>                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi teknis pemungutan pajak dan retribusi belum sepenuhnya diperbarui.</li> <li>2. Penetapan tarif belum</li> </ol>                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan peta potensi pajak dan retribusi berbasis wilayah dan sektor.</li> <li>2. Pembaruan database objek dan subjek pajak secara</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>daerah belum akurat dan mutakhir.</p> <p>3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi belum optimal.</p> <p>4. Inovasi sumber-sumber PAD baru belum berkembang secara signifikan.</p> <p>5. Pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan belum optimal.</p> | <p>berbasis kajian potensi dan kemampuan masyarakat.</p> <p>3. Implementasi kebijakan opsen dan pajak daerah baru belum maksimal.</p> <p>4. Koordinasi antar perangkat daerah penghasil PAD belum sinergis.</p> <p>5. Belum adanya peta potensi PAD yang komprehensif dan terintegrasi.</p> <p>6. Sistem pengawasan internal terhadap kebocoran penerimaan masih lemah.</p> <p>7. Kapasitas aparatur pemungut pajak dan retribusi belum merata.</p> <p>8. Digitalisasi pemungutan PAD belum sepenuhnya terintegrasi.</p> <p>9. Basis data wajib pajak/retribusi belum ter-update secara</p> | <p>berkala.</p> <p>3. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada.</p> <p>4. Identifikasi sumber-sumber PAD baru sesuai regulasi.</p> <p>5. Penyesuaian tarif berbasis kajian ekonomi dan kemampuan masyarakat.</p> <p>6. Penguatan sistem pembayaran non-tunai (cashless).</p> <p>7. Pengembangan dashboard monitoring realisasi PAD secara real-time.</p> <p>8. Penguatan pengawasan lapangan dan audit kepatuhan.</p> <p>9. Transformasi aset idle menjadi aset produktif.</p> <p>10. Pelatihan teknis perpajakan daerah dan analisis potensi.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berkala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang belum maksimal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan penatausahaan BMD belum sepenuhnya tertib dan akurat.</li> <li>2. Masih terdapat BMD yang belum memiliki legalitas lengkap (sertifikat, dokumen kepemilikan).</li> <li>3. Pemanfaatan BMD belum optimal sebagai sumber pendapatan daerah.</li> <li>4. Masih terdapat aset idle atau kurang produktif.</li> <li>5. Pengamanan fisik dan administrasi BMD belum sepenuhnya efektif.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMD belum berjalan optimal.</li> <li>7. Sistem informasi pengelolaan BMD belum terintegrasi dan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data BMD belum sepenuhnya valid dan ter-update.</li> <li>2. Proses sertifikasi tanah dan bangunan berjalan lambat.</li> <li>3. Pengamanan fisik belum memadai pada aset tertentu.</li> <li>4. Kapasitas pengurus barang dan pengelola aset belum merata.</li> <li>5. Kurangnya pemahaman tentang skema pemanfaatan (sewa, KSP, BGS, dll).</li> <li>6. Belum adanya peta potensi pemanfaatan aset secara komprehensif.</li> <li>7. Kurangnya kajian kelayakan (feasibility study) sebelum pemanfaatan aset.</li> <li>8. Aplikasi pengelolaan aset belum terintegrasi dengan sistem</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan peta potensi pemanfaatan BMD berbasis nilai ekonomi.</li> <li>2. Pengembangan skema pemanfaatan (sewa, KSP, BGS/BSG, kerja sama pemanfaatan lainnya).</li> <li>3. Transformasi aset idle menjadi aset produktif.</li> </ol> |



|    |                                                     | mutakhir.                                                                            | keuangan daerah.                                                     |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4. | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah       | 1. Belum ada penilaian dari tim penilai AKIP OPD (Inspektorat)                       | 1. Evaluasi metode penilaian AKIP OPD                                | 1. Mengevaluasi Kembali indikator kinerja pada OPD |
| 5. | Prosentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah | 1. Dokumen yang dipublikasi belum tersedia seluruhnya, karena sedang dalam audit BPK | 1. Dokumen pelapooran keuangan daerah (Akuntansi)                    | 1. Mengevaluasi Kembali indikator kinerja pada OPD |
|    | Persentase Penilaian Opini BPK                      | 1. Belum ada penilaian dari BPK                                                      | 1. Mengevaluasi Kembali indikator kinerja pada OPD                   | 1. Mengevaluasi Kembali indikator kinerja pada OPD |
| 7. | Solvabilitas Jangka Panjang                         | 1. Tidak ada nilai hutang jangka Panjang sebagai pembanding dengan total aset tetap  | 1. Mengevaluasi indikator kinerja pada OPD dengan indikator di RPJMD | 1. Mengevaluasi Kembali indikator kinerja pada OPD |



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran program kegiatan tahun 2025, terdiri dari:

##### a. Tujuan dan Sasaran Renstra RPJMD 2025-2029 yang diampu Perangkat Daerah

Proses pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisahkan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo (2025-2029) adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)”**

Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Probolinggo secara terarah dan terpadu.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025-2029 yang diampu oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah:

**Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional**, dengan indikator tujuannya adalah; **“Indeks Reformasi Birokrasi”**

Tujuan 1 RPJMD ini diturunkan pada pada level **sasaran** sebagai berikut :

- Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah, dengan indikator ; **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**



#### **b. Tujuan dan Sasaran RENSTRA BPPKAD 2025 -2029**

Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan strategi BPPKAD dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, penataan dan pemanfaatan aset daerah secara profesional, serta penguatan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2025 – 2029, adalah sebagai berikut ;



| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                                       | TUJUAN                                                                                                               | SASARAN                                                 | INDIKATOR                                                      | BASE LINE<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETE<br>RANG<br>AN |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         |                                                                |                   |              |      |      |      |      |      |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         |                                                                |                   | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                    |
| (01)                                                                            | (02)                                                                                                                 | (03)                                                    | (04)                                                           | (05)              | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)               |
| 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |                                                                                                                      |                                                         |                                                                |                   |              |      |      |      |      |      |                    |
| - Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif                       | Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah |                                                         | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)              | 70                | 71           | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)              | 1                 | 1            | 1.5  | 2    | 3    | 3.50 | 4    |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%) | 70                | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)               | 60                | 70           | 75   | 80   | 90   | 95   | 100  |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         | Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)        | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         | Prosentase Penyerapan Anggaran (%)                             | 87                | 92           | 92.5 | 93   | 93.5 | 94   | 95   |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         | Fleksibilitas Keuangan (%)                                     | 2                 | 2.02         | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.15 | 2.19 |                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                         | Solvabilitas Operasional (%)                                   | 81.80             | 81.9         | 82   | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 82.4 |                    |



LKjPD BPPKAD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2025

|  |  |  |                                            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|--|--|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  |  |  | Persentase Penilaian Opini BPK (%)         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |  |
|  |  |  | Solvabilitas Jangka Panjang (%)            | 0          | 15.69      | 7          | 51.63      | 290        | 84         | 101        |  |
|  |  |  | Solvabilitas Layanan (Rp/org)              | 2286321.23 | 2301246.61 | 2488165.39 | 2330768.19 | 2198595.71 | 2086263.17 | 1989822.11 |  |
|  |  |  | Solvabilitas Jangka Pendek (%)             | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |  |
|  |  |  | Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%) | 14         | 16.31      | 17.33      | 18.35      | 19.37      | 20         | 20.39      |  |

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD TA.2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025–2029 disusun sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah. IKU BPPKAD dirumuskan secara terukur, relevan, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029. Penetapan IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan BPPKAD berorientasi pada hasil (outcome) serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Indikator kinerja utama BPPKAD mencerminkan fokus kinerja pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta pengelolaan aset daerah yang tertib, optimal, dan berkelanjutan. Selain itu, IKU juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Melalui penetapan IKU ini, diharapkan kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat terukur secara objektif dan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja selama periode Tahun Anggaran 2025–2029. IKU ini juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada kepala daerah dan masyarakat.



**TABEL 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Tahun 2025**  
 (berdasarkan Renstra 2025-2029)

| NO | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                               | PENANGGUNG JAWAB       | SUMBER DATA                                    |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                      |                                                |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | Penilaian AKIP oleh Inspektorat                                                                                                                                                                                                                     | Sekretariat BPPKAD     | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran           |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 1. Kesesuaian nama program pada dokumen RPJMD dan RKPD<br>2. Kesesuaian nama program pada dokumen RKPD dan dokumen KUA PPAS<br>3. Kesesuaian nama program pada dokumen dokumen KUA PPAS dan dokumen APBD<br>4. Kesesuaian pagu program pada dokumen | Bidang Anggaran BPPKAD | Dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan dokumen APBD |



|  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                           | RKPD dan dokumen KUA PPAS                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|  |                                           | 5. Kesesuaian pagu program pada dokumen dokumen KUA PPAS dan dokumen APBD                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|  | Prosentase Pengalokasian Anggaran Belanja | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anggaran Pendidikan Sebesar 20% Dari Apbd</li> <li>– Anggaran Kesehatan Sebesar 10% Dari Apbd, di luar gaji</li> <li>– Anggaran Infrastruktur Paling Sedikit Sebesar 25% Dari Dana Transfer Umum (DTU)</li> </ul> | Bidang Anggaran BPPKAD<br><br>Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 2) |



LKjPD BPPKAD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2025

|  |  |                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Prosentase<br>Transparansi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah | Bukti Upload 29 Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Daerah di website<br>Pemerintah Daerah<br>dengan rentang waktu<br>upload maksimal 30 hari<br>tanggal penetapan. | Bidang Anggaran<br>BPPKAD          | Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri nomor 19<br>tahun 2020 tentang<br>Pengukuran Indek<br>Pengelolaan Keuangan<br>Daerah (Dimensi 3) |
|  |  | Prosentase<br>Penyerapan<br>Anggaran                         | Persentase Penyerapan<br>Anggaran Belanja dengan<br>Realisasinya dengan batas<br>minimal 80% dari<br>anggaran                                                                       | Bidang<br>Perbendaharaan<br>BPPKAD | Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri nomor 19<br>tahun 2020 tentang<br>Pengukuran Indek<br>Pengelolaan Keuangan<br>Daerah (Dimensi 4) |
|  |  | Fleksibilitas<br>Keuangan                                    | Total Pendapatan – DAK<br><hr/> Total kewajiban – belanja                                                                                                                           | Bidang Akuntansi<br>BPPKAD         | Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri nomor 19<br>tahun 2020 tentang                                                                   |



|  |  |                                |                                                                                    |                         |                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                | pegawai                                                                            |                         | Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5)                                                            |
|  |  | Solvabilitas Operasional       | $\frac{\text{Totala Pendapatan Daerah LO - Pend DAK (LO)}}{\text{Total Beban LO}}$ | Bidang Akuntansi BPPKAD | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |
|  |  | Persentase Penilaian Opini BPK | WTP = 100%<br>WDP = 75%<br>Tidak Wajar = 50%<br>Disclaimer of Opinion= 0%          | Bidang Akuntansi BPPKAD | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |



|  |  |                             |                                                                   |                    |                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Solvabilitas Jangka Panjang | $\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$ | Bidang Aset BPPKAD | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |
|  |  | Solvabilitas Layanan        | $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$     | Bidang Aset BPPKAD | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |



LKjPD BPPKAD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2025

|  |  |                                        |                                                                                             |                          |                                                                                                                     |
|--|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Solvabilitas Jangka Pendek             | $\frac{\text{Kas \& setara kas + Investasi jk pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100$ | Bidang Akuntansi BPPKAD  | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |
|  |  | Persentase Kemandirian Keuangan Daerah | $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total}} \times 100$                                          | Bidang Pendapatan BPPKAD | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |



### 2.3 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel. 2.2**

**Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan BPPKAD Tahun 2025**

(berdasarkan Renstra 2025-2029)

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                   | PROGRAM KEGIATAN                                                             | KEGIATAN /SUBKEGIATAN                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                   | 3                                                                            | 5                                                                                     |
| 1  | Meningkatnya<br>Akuntabilitas<br>Tata Kelola<br>Perangkat<br>Daerah | PROGRAM PENUNJANG<br><br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br><br>KABUPATEN/KOTA | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |
|    |                                                                     |                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
|    |                                                                     |                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |
|    |                                                                     |                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|    |                                                                     |                                                                              | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                     |
|    |                                                                     |                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |



|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                   |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                          |
| Pendidikan dan Pelatihan<br><br>Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi               |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                          |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          |



|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |



|   |                                   |                                     |                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   |                                     | Penyediaan Jasa                                                                                                     |
|   |                                   |                                     | Pelayanan Umum Kantor                                                                                               |
|   |                                   |                                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |
|   |                                   |                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|   |                                   |                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |
|   |                                   |                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |
|   |                                   |                                     | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                            |
|   |                                   |                                     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                              |



Keuangan

Daerah

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                   |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                   |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD               |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                            |
| <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                       |
| Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan |



|  |                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                                                                                                    |
|  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                               |
|  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan<br>dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |
|  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                       |
|  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                        |
|  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                   |
|  | Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,                                                                                    |



|                     |  |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  | Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                   |
|                     |  | Konsolidasi Laporan                                                                                                                                                                                                         |
|                     |  | Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan                                                                                                                                                                                             |
|                     |  | Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                  |
|                     |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
|                     |  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              |
|                     |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        |
|                     |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       |
| PROGRAM PENGELOLAAN |  | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  |
|                     |  | <b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                             |



|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARANG MILIK DAERAH                   | Penyusunan Standar Harga                                                                                |
|                                       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    |
|                                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       |
|                                       | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |
|                                       | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |
|                                       | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |
|                                       | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                           |
|                                       | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                |
|                                       | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         |
|                                       | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan                                                         |



|  |  |                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
|  |  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                              |
|  |  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                     |
|  |  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                     |
|  |  | Penagihan Pajak Daerah                                                    |
|  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    |

## 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan BPPKAD Tahun 2025 menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (cascading) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran



**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025**

| No | Sasaran Kinerja                                         | Indikator Kinerja Sasaran                                  | Satuan     | Target Tahunan | Target Tribulanan |     |     |              |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----|-----|--------------|
|    |                                                         |                                                            |            |                | TW1               | TW2 | TW3 | TW4          |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah              | %          | 1              | 1                 | 0   | 0   | 0            |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | %          | 100            | 100               | 0   | 0   | 0            |
|    |                                                         | Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | %          | 70             | 70                | 0   | 0   | 0            |
|    |                                                         | Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah        | %          | 100            | 50                | 0   | 0   | 50           |
|    |                                                         | Persentase Penyerapan Anggaran                             | %          | 92             | 15                | 30  | 40  | 7            |
|    |                                                         | Fleksibilitas Keuangan                                     | %          | 2.20           | 0                 | 0   | 0   | 2.20         |
|    |                                                         | Solvabilitas Operasional                                   | %          | 81.9           | 0                 | 0   | 0   | 81.9         |
|    |                                                         | Persentase Penilaian Opini BPK                             | %          | 100            | 0                 | 0   | 0   | 100          |
|    |                                                         | Solvabilitas Jangka Panjang                                | %          | 15.69          | 0                 | 0   | 0   | 15.69        |
|    |                                                         | Indek Solvabilitas Layanan                                 | Rupiah/org | 2.301.246.61   | 0                 | 0   | 0   | 2.301.246.61 |
|    |                                                         | Solvabilitas Jangka Pendek                                 | %          | 100            | 0                 | 0   | 0   | 100          |
|    |                                                         | Persentase Kemandirian Keuangan Daerah                     | %          | 16.31          | 0                 | 0   | 0   | 16.31        |



## **2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pimpinan instansi yang diberi tugas akan berusaha mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan pimpinan instansi yang memberi tugas memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Target sasaran yang akan dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :,



**Tabel 2.5.**  
**Perjanjian Kinerja BPPKAD Perubahan**  
**Kabupaten Probolinggo Tahun 2025**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | Satuan  | TARGET       |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                        |         | (4)          |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | %       | 1            |
| 2.. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah      | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | %       | 100          |
|     |                                                        | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | %       | 70           |
|     |                                                        | Prosentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah        | %       | 100          |
|     |                                                        | Prosentase Penyerapan Anggaran                             | %       | 92           |
|     |                                                        | Fleksibilitas Keuangan                                     | %       | 2.02         |
|     |                                                        | Solvabilitas Operasional                                   | %       | 81.9         |
|     |                                                        | Persentase Penilaian Opini BPK                             | %       | 100          |
|     |                                                        | Solvabilitas Jangka Panjang                                | %       | 15.69        |
|     |                                                        | Solvabilitas Layanan                                       | Rp /org | 2.301.246.61 |
|     |                                                        | Solvabilitas Jangka Pendek                                 | %       | 100          |
|     |                                                        | Prosentase Kemandirian Keuangan                            | %       | 16.31        |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengukuran kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran kinerja utama dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah diperjanjikan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo dengan Bupati tahun 2025. Sedangkan capaian indikator kinerja individu dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang diperjanjikan antara atasan selaku pemberi amanah dengan staf sebagai penerima amanah secara berjenjang.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut:

**TABEL 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Daerah**

| NO. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Lebih dari 100                   | Sangat Baik                          |
| 2.  | 75 – 100 %                       | Baik                                 |
| 3.  | 55 – 74 %                        | Cukup                                |
| 4.  | ≤ 50 %                           | Kurang                               |

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo digunakan untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja BPPKAD.

Pengukuran kinerja di gunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan BPPKAD Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

| NO                       | SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                         | TARGET TAHUN 2025 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) | PREDIKAT    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Renstra 2024-2026</b> |                                                    |                                                 |                   |                |             |             |
| 1                        | Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah   | 1%                | 1.48           | 148 %       | Sangat Baik |
| 2                        | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah  | Indek pengalokasian anggaran belanja dalam APBD | 20                | 15             | 75%         | Baik        |
|                          |                                                    | Indek transparansi pengelolaan keuangan daerah  | 13.45             | 9.31           | 69.2 %      | Cukup       |
|                          |                                                    | Indek penyerapan anggaran APBD                  | 17.14             | 17.78          | 103 %       | Sangat Baik |
| 3                        | Meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah               | Indek Kemandirian keuangan                      | 13.00             | 17.67          | 135 %       | Sangat Baik |
|                          |                                                    | Indek Fleksibilitas Keuangan                    | 2.20              | 6.29           | 285 %       | Sangat Baik |
|                          |                                                    | Indek Solvabilitas Layanan                      | 2.200.000         | 2.301.247      | 104%        | Sangat Baik |



| NO                       | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | TARGET TAHUN 2025           | REALISASI 2025              | CAPAIAN (%) | PREDIKAT    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Renstra 2025-2029</b> |                                                        |                                                            |                             |                             |             |             |
| 1.                       | Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | 1 %                         | 1.48                        | 148 %       | Sangat Baik |
| 2.                       | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah      | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100 %                       | 97.8%                       | 97.8%       | Baik        |
|                          |                                                        | Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | 70 %                        | 87.3%                       | 124.71%     | Sangat Baik |
|                          |                                                        | Persentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah        | 100 %                       | 58.62%                      | 58.62%      | Cukup       |
|                          |                                                        | Persentase Penyerapan Anggaran                             | 92 %                        | 95.35%                      | 103.64%     | Sangat Baik |
|                          |                                                        | Fleksibilitas Keuangan                                     | 2.02 %                      | 2.08%                       | 102.97%     | Sangat Baik |
|                          |                                                        | Solvabilitas Operasional                                   | 81.9 %                      | 84.16%                      | 102.76%     | Sangat Baik |
|                          |                                                        | Persentase Penilaian Opini BPK                             | 100 %                       | 0%                          | 0%          | Kurang      |
|                          |                                                        | Solvabilitas Jangka Panjang                                | 15.69 %                     | 0%                          | 0%          | Kurang      |
|                          |                                                        | Solvabilitas Layanan                                       | Rp.<br>2.301.246.61/or<br>g | Rp.<br>2.220.624.74<br>/org | 96.50%      | Baik        |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA         | TARGET TAHUN 2025 | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) | PREDIKAT    |
|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
|    |                   | Solvabilitas Jangka Pendek      | 100 %             | 337.13%        | 337.13%     | Sangat Baik |
|    |                   | Prosentase Kemandirian Keuangan | 16.31 %           | 17.80%         | 109.14%     | Sangat Baik |

*\*isi tabel disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II TA.2025. Realisasi berdasarkan Capaian Kinerja Kepala Badan Tw 4 Tahun 2025.*



Hasil perhitungan capaian indikator kinerja utama pada Renstra Tahun 2024-2026 dengan Sasaran strategis :

1. Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah, dengan indikator sasaran;
  - Target Persentase kenaikan LHE AKIP yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 1%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1,48%, sehingga tingkat capaian mencapai 148% dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan lebih optimal dibandingkan target yang direncanakan.
  - Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 akan dilaksanakan bulan maret 2026 oleh Inspektorat Daerah. Sehingga capaian AKIP BPPKAD yang dituangkan pada dokumen table 3.2 (Renstra 2025-2029) menggunakan nilai tahun 2024 yang dibandingkan dengan nilai AKIP 2023 dengan capaian 148%.
  - Sedangkan nilai AKIP tahun 2025 BPPKAD capai ditargetkan 1%.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator sasaran;
  - Indek pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, target 20 didapat realisasi 15 dengan capaian 75% kategori Baik.
  - Indek transparansi pengelolaan keuangan daerah, target 13.45 didapat realisasi 9.31 dengan capaian 69.2 % kategori Cukup. Capaian ini belum maksimal karena masih ada dokumen yang belum bisa di upload di website pemerintah kabupaten Probolinggo karena masih dalam proses audit oleh BPK.
  - Indek penyerapan anggaran APBD, target 17.14 didapat realisasi 17.78 dengan capaian 103 % kategori sangat baik.
3. Meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah , dengan indikator sasaran;
  - Indek Kemandirian keuangan, target 13.00 didapat realisasi 17.67 dengan capaian 135 % kategori sangat baik.
  - Indek Fleksibilitas Keuangan, terget 2.20 didapat realisasi 6.29 dengan capaian 285 % kategori sangat baik.
  - Indek Solvabilitas Layanan, terget Rp. 2.200.000 didapat realisasi Rp. 2.301.247,00 dengan capaian 104 % kategori sangat baik.



Sedangkan hasil perhitungan capaian IKU Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. **Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n**



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Renstra 2025-2029**

| No | Sasaran strategis                                      | Indikator kinerja                                          | Satuan | Target tahun 2025 | Realisasi tahun 2025 | Capaian Kinerja (%) |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | %      | 1 %               | 1.48                 | 148 %               |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah      | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | %      | 100 %             | 97.8%                | 97.8%               |
|    |                                                        | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | %      | 70 %              | 87.3%                | 124.71%             |
|    |                                                        | Prosentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah        | %      | 100 %             | 58.62%               | 58.62%              |
|    |                                                        | Prosentase Penyerapan Anggaran                             | %      | 92 %              | 95.35%               | 103.64%             |
|    |                                                        | Fleksibilitas Keuangan                                     | %      | 2.02 %            | 2.08%                | 102.97%             |
|    |                                                        | Solvabilitas Operasional                                   | %      | 81.9 %            | 84.16%               | 102.76%             |
|    |                                                        | Persentase Penilaian Opini BPK                             | %      | 100 %             | 0%                   | 0%                  |
|    |                                                        | Solvabilitas Jangka Panjang                                | %      | 15.69 %           | 0%                   | 0%                  |



| No | Sasaran strategis | Indikator kinerja               | Satuan      | Target tahun 2025 | Realisasi tahun 2025 | Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|    |                   | Solvabilitas Layanan            | Rupiah /org | 2.301.246.61      | 2.220.624.74         | 96.50%              |
|    |                   | Solvabilitas Jangka Pendek      | %           | 100 %             | 337.13%              | 337.13%             |
|    |                   | Prosentase Kemandirian Keuangan | %           | 16.31 %           | 17.80%               | 109.14%             |



## ANALISA CAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

### I. Sasaran Strategis I

- Target Persentase kenaikan LHE AKIP yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 1%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1,48%, sehingga tingkat capaian mencapai 148% dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan lebih optimal dibandingkan target yang direncanakan
- Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 akan dilaksanakan bulan maret 2026 oleh Inspektorat Daerah. Sehingga capaian AKIP BPPKAD yang dituangkan pada dokumen table 3.2 (Renstra 2025-2029) menggunakan nilai tahun 2024 yang dibandingkan dengan nilai AKIP 2023 dengan capaian 148%.
- Sedangkan nilai AKIP tahun 2025 BPPKAD capai ditargetkan 1%.

### II. Sasaran Strategis II

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”:

- Pengalokasian Anggaran APBD (124,71%)  
Realisasi melebihi target menunjukkan perencanaan belanja daerah lebih progresif dibandingkan asumsi awal.
- Penyerapan Anggaran (103,64%)  
Tingkat penyerapan sebesar 95,35% menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Fleksibilitas Keuangan dan Solvabilitas Operasional (>102%)  
Menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional secara memadai.
- Solvabilitas jangka Pendek 337%  
Pemerintah daerah memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan sangat aman.
- Kemandirian Keuangan (109,14%)  
Mengindikasikan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

**b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir RPJMD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.**



**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025**  
**dengan target akhir Renstra 2025-2029**

| Sasaran Kinerja |                                                   | Indikator Kinerja |                                                            | Satuan | Realisasi | Target akhir RENSTRA |                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
|                 |                                                   |                   |                                                            |        | 2025      | 2029                 | Capaian 2025 terhadap target 2029 |
| 1               | Meningkatkan tatakelola perangkat daerah          | 1                 | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | %      | 1.48      | 3.50                 | 42.28 %                           |
| 2               | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1                 | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | %      | 97,8      | 100                  | 97.8 %                            |
|                 |                                                   | 2                 | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | %      | 87,3      | 95                   | 91.89 %                           |
|                 |                                                   | 3                 | Prosentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah        | %      | 58,62     | 100                  | 58.62 %                           |
|                 |                                                   | 4                 | Prosentase Penyerapan Anggaran                             | %      | 95,35     | 94                   | 101.43 %                          |
|                 |                                                   | 5                 | Fleksibilitas Keuangan                                     | %      | 2,08      | 2,15                 | 130.23 %                          |
|                 |                                                   | 6                 | Solvabilitas Operasional                                   | %      | 84,16     | 82,3                 | 102.26 %                          |
|                 |                                                   | 7                 | Persentase Penilaian Opini BPK                             | %      | 0         | 100                  | 0 %                               |
|                 |                                                   | 8                 | Solvabilitas Jangka Panjang                                | %      | 0         | 84                   | 0 %                               |



| Sasaran Kinerja |  | Indikator Kinerja |                                 | Satuan | Realisasi    | Target akhir RENSTRA |                                   |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------------|--------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
|                 |  |                   |                                 |        | 2025         | 2029                 | Capaian 2025 terhadap target 2029 |
|                 |  | 9                 | Solvabilitas Layanan            | Rupiah | 2.220.624,74 | 2.086.263,17         | 106.44 %                          |
|                 |  | 10                | Solvabilitas Jangka Pendek      | %      | 337.13       | 100                  | 337.13 %                          |
|                 |  | 11                | Prosentase Kemandirian Keuangan | %      | 17,80        | 20                   | 89 %                              |

\*sasaran strategis dan indikator mengacu pada Perjanjian Kinerja Eselon II dan dokumen RENSTRA - BPPKAD Tahun 2025-2029



## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA BPPKAD 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029**

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah berada pada kategori baik hingga sangat baik, bahkan beberapa indikator telah melampaui target akhir Renstra 2029. Namun demikian, masih terdapat indikator strategis yang belum menunjukkan progres signifikan, khususnya pada aspek akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan.

### **I. Sasaran 1**

#### **Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah**

Pada tahun pertama (2025), instansi telah mengamankan **42,28%** dari total target pertumbuhan yang ditetapkan untuk akhir periode RENSTRA (2029). Ini menunjukkan awal yang cukup solid karena hampir mencapai setengah target dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mencapai sisa target sebesar 2,02% (3,50% - 1,48%) dalam 4 tahun ke depan, perangkat daerah hanya memerlukan rata-rata kenaikan sekitar 0,50% per tahun. Indikator ini merupakan indikator strategis karena berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan.

- Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 akan dilaksanakan bulan maret 2026 oleh Inspektorat Daerah. Sehingga capaian AKIP BPPKAD yang dituangkan pada dokumen table 3.2 (Renstra 2025-2029) menggunakan nilai tahun 2024 yang dibandingkan dengan nilai AKIP 2023 dengan capaian 148%.
- Sedangkan nilai AKIP tahun 2025 BPPKAD capai ditargetkan 1%.

### **II. Sasaran 2**

#### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Secara umum, sebagian besar indikator telah menunjukkan progres yang cukup baik terhadap target 2029, bahkan beberapa telah melampaui target akhir.

##### **a. Indikator Sangat Baik ( $\geq 100\%$ )**

- Penyerapan Anggaran 101,43%
- Fleksibilitas Keuangan 130,23%
- Solvabilitas Operasional 102,26%
- Solvabilitas Layanan 106,44%
- Solvabilitas Jangka Pendek 337,13%



Evaluasi:

- Likuiditas dan kemampuan operasional daerah sangat kuat.
- Pengelolaan belanja relatif efektif.
- Kapasitas fiskal dalam jangka pendek sangat memadai.

**b. Indikator Mendekati Target (80–99%)**

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 97,8%
- Pengalokasian Anggaran dalam APBD 91,89%
- Kemandirian Keuangan 89%..

Evaluasi:

- Konsistensi dokumen sudah baik namun belum sempurna.
- Kemandirian fiskal masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD.

**c. Indikator Rendah / Belum Tercapai**

- Transparansi Pengelolaan Keuangan 58,62%
- Opini BPK 0%
- Solvabilitas Jangka Panjang 0%

Evaluasi:

- Transparansi keuangan masih menjadi tantangan utama.
- Perlu klarifikasi dan penguatan upaya mempertahankan opini WTP.
- Manajemen kewajiban jangka panjang perlu evaluasi lebih lanjut.



c. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.5

PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA TA 2025

| No | Kebhasilan                                      | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kegagalan                                                                                                                                                                 | Kendala dan Permasalahan                                                                                                                                                                                                                     | Alternatif/ Solusi/ Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                         | Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ Inovasi             |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | - Penilaian LHE AKIP BPPKAD tahun anggaran 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan</li> <li>- Optimalisasi digitalisasi dalam pemantauan system kinerja secara real time</li> <li>- Meningkatnya Budaya kerja ASN, bahwa AKIP bukan hanya sekedar kewajiban melainkan kebutuhan dalam bekerja.</li> <li>- Keselarasan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang keluar berkontribusi langsung pada indikator kinerja.</li> </ul> | - Penyerapan anggaran yang hanya 76.35 % dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan dalam perencanaan anggaran yang presisi, meskipun secara efisiensi ini dinilai positif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses input data yang masih dianggap membebani pekerjaan teknis utama pegawai</li> <li>- Perubahan regulasi dari kementerian RB yang memerlukan adaptasi cepat dalam penyusunan laporan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review anggaran pada tengah tahun anggaran</li> <li>- Membudayakan pendokumentasian kegiatan secara langsung pada hari yang sama untuk menjaga validitas data dukung.</li> <li>- Coaching clinic secara berkala bagi pengelola kinerja disetiap</li> </ul> | - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota |



| No | Keberhasilan                                | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                   | Kegagalan | Kendala dan Permasalahan | Alternatif/ Solusi/ Inovasi                  | Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ Inovasi |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          | bidang agar standar kualitas dokumen seragam |                                                    |
| 2  | - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memenuhi prinsip penganggaran</li> <li>- Evaluasi dari BPKP Provinsi terhadap dokumen penganggaran kabupaten/kota untuk awal tahun anggaran baru.</li> </ul> | -         | -                        | -                                            | -                                                  |
| 3  | - Penyerapan Anggaran dalam APBD TA 2025    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedisiplinan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal anggaran.</li> <li>- Komitmen kuat pejabat daerah dalam</li> </ul>                                        | -         | -                        | -                                            | -                                                  |



| No | Keberhasilan               | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                                                                                                            | Kegagalan                           | Kendala dan Permasalahan                               | Alternatif/ Solusi/ Inovasi          | Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ Inovasi                 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                            | memastikan program berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan.<br>- Penyusunan APBD dan RKA-SKPD yang realistis dan tepat sasaran memudahkan pencapaian target belanja. |                                     |                                                        |                                      |                                                                    |
| 4  | - Solvabilitas Operasional | - Target capaian kinerja realistis                                                                                                                                       | -                                   | -                                                      | -                                    | -                                                                  |
| 5  | - Solvabilitas Layanan     | - Realisasi belanja modal asset tetap pemerintah kabupaten tinggi                                                                                                        | -                                   | -                                                      | -                                    | -                                                                  |
| 6  | - Kemandirian keuangan     | - Target capaian kinerja pada indikator ini menyesuaikan dengan kemampuan daerah                                                                                         | -                                   | -                                                      | -                                    | -                                                                  |
| 7  | -                          | -                                                                                                                                                                        | - Transparansi Pengelolaan Keuangan | - Publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran belum | - Penyesuaian target capaian kinerja | - Program pengelolaan keuangan daerah<br>- Kegiatan Koordinasi dan |



| No | Keberhasilan | Faktor Pendukung Keberhasilan | Kegagalan   | Kendala dan Permasalahan                                                                                                              | Alternatif/ Solusi/ Inovasi          | Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ Inovasi                                                         |
|----|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                               |             | sepenuhnya dilakukan karena masih ada dokumen pelaporan keuangan yang masih dalam tahap penilaian oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) |                                      | Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                         |
| 8  | -            | -                             | - Opini BPK | - Penilaian dilakukan di tahun anggaran berikutnya                                                                                    | - Penyesuaian target capaian kinerja | - Program pengelolaan keuangan daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |



| No | Keberhasilan                 | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                               | Kegagalan                     | Kendala dan Permasalahan                                                                                                        | Alternatif/ Solusi/ Inovasi          | Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ Inovasi                                                         |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | -                            | -                                                                                           | - Solvabilitas Jangka Panjang | - Nilai indikator solvabilitas jangka panjang tidak dapat dinilai karena tidak ada nilai hutang sebagai pembagi dari aset tetap | - Penyesuaian target capaian kinerja | - Program pengelolaan keuangan daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |
| 10 | - Solvabilitas Jangka Pendek | - Pemerintah daerah memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan sangat aman. | -                             | -                                                                                                                               | -                                    | -                                                                                                          |
| 11 | - Solvabilitas layanan       | - Nilai asset tetap pemerintah daerah sebanding dengan jumlah penduduk                      | -                             | -                                                                                                                               | -                                    | -                                                                                                          |



## **I. ANALISA KEBERHASILAN DAN FAKTOR PENDUKUNG**

### **1. Pengelolaan Anggaran dan Penyerapan APBD**

#### **Keberhasilan utama:**

- Penilaian LHE AKIP BPPKAD tahun anggaran 2025
- Pengalokasian belanja APBD sesuai prinsip penganggaran.
- Penyerapan anggaran TA 2025 berjalan optimal.
- Kedisiplinan OPD tinggi.
- Komitmen kuat TAPD dan pimpinan daerah.
- Dokumen APBD dan RKA-SKPD disusun realistis

Keberhasilan ini menunjukkan tata kelola fiskal daerah berada pada kategori baik dan terkendali. Realisasi anggaran yang tinggi umumnya mencerminkan:

- Perencanaan yang matang (budget credibility tinggi).
- Sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan.
- Minimnya revisi anggaran signifikan di tengah tahun.

Secara teknis, tingginya serapan anggaran (misalnya di atas 95%) biasanya menunjukkan efektivitas manajemen kas dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

## **II. Kinerja Solvabilitas dan Kemandirian Keuangan**

- Solvabilitas Jangka Pendek
  - Pemda mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan sangat aman. (Current ratio kemungkinan jauh di atas 1 (>1 menunjukkan aman, >2 sangat aman). Ini mencerminkan likuiditas kas yang sehat.)
- Solvabilitas Operasional
  - Target realistis menunjukkan perencanaan pendapatan dan belanja tidak overestimate.
- Solvabilitas Layanan
  - Nilai aset tetap tinggi dan sebanding dengan jumlah penduduk menunjukkan:
  - Kapasitas layanan publik memadai.
  - Infrastruktur daerah relatif kuat.
- Kemandirian Keuangan



Target disesuaikan kemampuan daerah → kebijakan fiskal berhati-hati (fiscal prudence).

- Kesimpulan sektor ini:

Struktur keuangan daerah relatif stabil, tidak agresif, dan berada dalam kondisi aman secara likuiditas dan aset.

### III. Analisa Kegagalan, Kendala dan Permasalahan;

#### 1. Transparansi Pengelolaan Keuangan;

Kendala:

- Publikasi dokumen belum maksimal.
- Dokumen masih dalam proses audit BPK.

Analisa:

- Keterlambatan audit menyebabkan:
  - Transparansi tertunda.
  - Persepsi publik terhadap akuntabilitas bisa menurun.
  - Indeks reformasi birokrasi bisa terdampak.

#### 2. Opini BPK

Opini penilaian BPK masih belum bisa dipublikasikan karena masih dalam pemeriksaan .

Kendala :

- Indikator tidak dapat dipenuhi pada tahun anggaran berjalan.

Analisa :

- Perlu redefinisi indikator agar tetap relevan.

#### 3. Solvabilitas Jangka Panjang

Tidak dapat dinilai karena tidak ada hutang sebagai salah satu variable penghitungan pada formula/rumus hitung indikator ini.

Kendala :

- kondisi positif (tidak memiliki utang), namun secara metodologis indikator menjadi tidak terukur.

Analisa:

- Perlu redefinisi indikator agar tetap relevan.

### IV. Alternatif Solusi dan Inovasi Strategis

Berikut arah perbaikan yang lebih sistematis:



**1. Penguatan Transparansi;**

- Publikasi dokumen sementara (unaudited) dengan disclaimer.
- Portal keterbukaan anggaran berbasis web.
- Infografis APBD yang mudah dipahami masyarakat.

**2. Penyesuaian Indikator Kinerja;**

Untuk indikator yang belum maksimal pencapaiannya, sebaiknya ;

- Menggunakan variabel atau ukuran yang mudah diukur secara langsung. Ini bertindak sebagai pengganti untuk mendekati esensi kuantitatif suatu hal. Tetapkan target berbasis proses, bukan hanya hasil akhir.

**3. Penguatan Manajemen Risiko Fiskal**

Walau tidak memiliki utang, daerah perlu:

- Stress test fiskal (simulasi jika pendapatan turun 10–15%).
- Pembentukan dana cadangan.
- Strategi diversifikasi PAD.



### 3.2 Realisasi Anggaran

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kegiatan/Subkegiatan**  
**Tahun 2025**

| No | Sasaran Kinerja                                   | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Anggaran          | Realisasi         | Capaian |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1. | Meningkatkan tatakelola perangkat daerah          | - Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | 26.503.850.599,02 | 20.234.692.707.00 | 76.35   |
| 2  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | - Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 1.051.785.592     | 867.797.608       | 82.51   |
|    |                                                   | - Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               |                   |                   |         |
|    |                                                   | - Prosentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah        | 685.541.700       | 673.668.854       | 98.27   |
|    |                                                   | - Prosentase Penyerapan Anggaran                             |                   |                   |         |
|    |                                                   | - Prosentase Penyerapan Anggaran                             | 515.999.751.000   | 501.972.024.334   | 97.28   |
|    |                                                   | - Fleksibilitas Keuangan                                     | 714.892.824       | 635.937.768       | 88.96   |
|    |                                                   | - Solvabilitas Operasional                                   |                   |                   |         |
|    |                                                   | - Persentase Penilaian Opini BPK                             |                   |                   |         |



|  |  |                                   |               |               |              |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|  |  | - Solvabilitas Jangka Panjang     |               |               |              |
|  |  | - Solvabilitas Layanan            | 2.744.573.475 | 2.622.847.226 | <b>95.56</b> |
|  |  | - Solvabilitas Jangka Pendek      |               |               |              |
|  |  | - Prosentase Kemandirian Keuangan | 2.902.533.500 | 2.696.163.911 | <b>92.89</b> |

❖ ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN SASARAN KINERJA

1. Sasaran 1 - Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah;

- Indikator sasaran1 hanya ada 1 dan diampu oleh sekretariat BPPKAD
- Tingkat serapan anggaran sebesar  $\pm 76,35\%$  menunjukkan pelaksanaan program tetap berjalan dengan pelampauan pencapaian target kinerja. Selisih anggaran sekitar Rp 6,26 miliar mengindikasikan adanya efisiensi. Mengingat indikator kinerja (Persentase kenaikan LHE AKIP) mengalami peningkatan

2. Sasaran 2 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator;

- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD
- Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 3 indikator sasaran ini diampu oleh bidang anggaran BPPKAD
  - Serapan cukup baik, namun belum optimal.
- Penyerapan Anggaran
  - Indikator sasaran ini diampu oleh bidang perbendaharaan BPPKAD
  - Pada indikator sasaran ini didukung pendanaan anggaran Dana Desa, BTT dan POKIR DPRD
  - Serapan sangat baik.
- Fleksibilitas Keuangan



- Solvabilitas Operasional
- Persentase Penilaian Opini BPK
  - Indikator sasaran ini diampu oleh bidang akuntansi BPPKAD
  - Serapan cukup baik.
- Solvabilitas Jangka Panjang
- Solvabilitas Layanan
- Solvabilitas Jangka Pendek
  - Indikator sasaran ini diampu oleh bidang pengelolaan barang milik daerah (BMD)
  - Tingkat realisasi tinggi menunjukkan dukungan belanja terhadap penguatan struktur keuangan.
- Prosentase Kemandirian Keuangan
  - Indikator sasaran ini diampu oleh bidang pengelolaan pendapatan daerah.
  - Serapan cukup tinggi.

**3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan****TABEL 3.7****REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN****BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH s/d 31 Desember 2025**

| No  | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Alokasi Biaya     |                 |           | Sumber Dana | Output/Keluaran                                                                                                                        |            |            |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|     |                                                                                       | Anggaran (Rp.)    | Realisasi (Rp.) | Capaian % |             | Uraian                                                                                                                                 | Target     | Realisasi  | Capaian % |
| A   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 26.503.850.599.02 | 20.234.692.707  | 76.35     |             | NILAI SAKIP PEMERINTAH DAERAH                                                                                                          | 1          | Proses     | Proses    |
| 1.  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 556.234.000       | 415.818.572     | 74.76     | DAU, SILPA  | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                                                | 100%       | 100%       | 100       |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 529.760.000       | 404.482.338     | 76.35     | DAU, SILPA  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            | 7 dokumen  | 7 dokumen  | 100       |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 19.394.000        | 7.254.320       | 37.40     | SILPA       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                       | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100       |
| 1,3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.080.000         | 4.081.914       | 57.65     | SILPA       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100       |



|     |                                                                 |                   |                |       |                 | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                    |            |            |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 2.  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 18.988.266.737,02 | 13.988.132.302 | 73.67 | DAU< PAD        | Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu                                                                                      | 100%       | 100%       | 100 |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | 18.969.366.737.02 | 13.987.352.302 | 73.67 | DAU, PAD        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 900 Orang  | 900%       | 100 |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ | 18.900.000        | 780.000.000    | 4.13  | DAU, PAD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP | 12 laporan | 12 laporan | 100 |
| 3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | 294.410.000       | 232.980.360    | 79.13 | DAU, SILPA, PAD | Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                                                                     | 100%       | 100%       | 100 |
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya          | 69.300.000        | 55.712010      | 80.39 | DAU             | Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan                                                                                             | 1 Paket    | 1 Paket    | 100 |
| 3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | 225.110.000       | 177.268.350    | 78.75 | DAU, SILPA, PAD | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan                                                                | 14 orang   | 14 orang   | 100 |



|     |                                                                  |              |             |        |                         |                                                                                    |          |          |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 513.630.3356 | 369.519.248 | 71.94  | Pajak Rokok, DAU, SILPA | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu              | 100 %    | 100 %    | 100  |
| 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.987.400   | 0           | 0      | DAU, SILPA              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket  | 0Paket   | 0    |
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 92.415.800   | 54.734.100  | 59..23 | DAU, SILPA              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 17 Paket | 17 Paket | 100  |
| 4,3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 20.332.000   | 11.542.890  | 56.77  | DAU                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 13 Paket | 13 Paket | 100. |
| 4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 43.900.000   | 38.369.892  | 87.40  | DAU, SILPA              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket | 12 Paket | 100  |
| 4.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 104.269.410  | 76.041.650  | 72.93  | DAU, SILPA              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 25 Paket | 25Paket  | 100  |
| 4.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 45.640.000   | 39.245.000  | 87.40  | DAU, SILPA              | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | 14 Paket | 14 Paket | 100  |



|     |                                                                    |               |               |       |                         |                                                                                           |             |             |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 4.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 157.085.746   | 135.684.631   | 86.38 | Pajak Rokok, DAU, SILPA | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 114 laporan | 114 laporan | 100 |
| 4.8 | Penataan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 35.000.000    | 13.901.085    | 39.72 | Pajak Rokok, DAU, SILPA | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                              | 555 Bok     | 555 Bok     | 100 |
| 5.  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 2.062.631.450 | 1.959.118.582 | 94.98 | PAD, DAU, SILPA         | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 100%        | 100%        | 100 |
| 5.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 280.000.000   | 257.100.000   | 91.82 | PAD, DAU, SILPA         | Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan       | 1 Unit      | 1 Unit      | 100 |
| 5.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | 0             | 0             | 0     | 0                       | Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan                     | 0           | 0           | 0   |
| 5.3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 699.121.100   | 645.768.252   | 92.37 | DAU, SILPA              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                   | 47 Unit     | 47 Unit     | 100 |
| 5.4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.083.510.350 | 1.056.250.330 | 97.48 | DAU                     | Jumlah Pengadaan Sarana prasaran Pendukung Gedung Kantor                                  | 1 Unit      | 1 Unit      | 100 |



|     |                                                                                                                    |               |               |       |            |                                                                                                                           |            |            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 6.  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 2.824.402.156 | 2.193.837.165 | 77.67 | DAU        | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                                           | 100%       | 100%       | 100 |
| 6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 27.752.800    | 13.002.000    | 46.85 | DAU        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                             | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| 6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 11.692.080    | 1.083.976     | 9.27  | DAU        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                    | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| 6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.784.957.276 | 2.179.751.189 | 78.27 | DAU        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                      | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| 7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.264.275.900 | 1.075.286.478 | 85.05 | DAU, SILPA | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara                                             | 100%       | 100%       | 100 |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 626.120.000   | 531.172.588   | 84.84 | DAU, SILPA | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31 Unit    | 31 Unit    | 100 |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 254.000.000   | 227.884.191   | 89.72 | DAU, SILPA | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 8 Unit     | 8 Unit     | 100 |



|     |                                                                                                             |                 |                 |       |            |                                                                                          |           |           |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | 139.155.900     | 102.765.901     | 73.85 | DAU        | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD                                             | 14 Unit   | 14 Unit   | 100 |
| 7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           | 245.000.000     | 213.463.798     | 87.13 | DAU        | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit    | 1 unit    | 100 |
| B.  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                         | 518.451.971.116 | 504.149.428.564 | 97.24 |            | - Indek pengalokasian anggaran,Indek penyerapan anggaran, indek transparansi anggaran    | 100%      | 100%      | 100 |
| 1.  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                           | 1.051.785.592   | 867.797.608     | 82.51 | DAU, SILPA | Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD (tepat waktu)                                 | 100%      | 100%      | 100 |
| 1.1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                      | 171.601.075     | 149.492.440     | 87.12 | DAU, SILPA | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun                                                | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | 176.736.247     | 150.068.846     | 84.91 | DAU, SILPA | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun                            | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 305.403.140     | 274.628.680     | 89.94 | SILPA      | Jumlah Dokumen Perda dan Perbup APBD yang tersusun                                       | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |



|     |                                                                                                                                                                                            |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                            |             |             |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                            | 190.108.880 | 165.373.009 | 86.99 | SILPA | Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang tersusun                                                                                                                               | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100 |
| 1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                         | 207.936.250 | 128.184.633 | 61.65 | SILPA | Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                         | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   | 100 |
| 2   | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                           | 685.541.700 | 673.668.854 | 98.27 | DAU   | Prosentase Realisasi Penyerapan APBD                                                                                                                                                       | 94.2%       | 95.31%      | 100 |
| 2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      | 85.544.500  | 81..991.430 | 95.85 | DAU   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 100 |
| 2.2 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan Instansi                                                                                                    | 22.640.400  | 22.216.608  | 98.13 | DAU   | Jumlah dokumen pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD                                                                                                                            | 220 Dokumen | 220 Dokumen | 100 |
| 2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 41.272.000  | 39.780.445  | 96.39 | DAU   | Jumlah laporan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 100 |
| 2.4 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi                                                                                 | 253.214.200 | 250.389.371 | 98.88 | DAU   | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta                                                                                                                 | 12 dokumen  | 12 dokumen  | 100 |



|     |                                                                                                                                                               |              |             |       |       |                                                                                                                                                           |            |            |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|     | terkait                                                                                                                                                       |              |             |       |       | Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait                                                                                               |            |            |     |
| 2.5 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerbitan dan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 133.483.000  | 131.435.500 | 98.47 | DAU   | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100 |
| 2.6 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 149.387.600  | 147.855.500 | 98.97 | DAU   | Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                         | 162 orang  | 162 orang  | 100 |
| 3   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            | 714.892.8224 | 635.937.768 | 88.96 | SILPA | Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD                                                                                               | 100%       | 100%       | 100 |
| 3.1 | Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                | 242.185.000  | 218.936.500 | 90.40 | SILPA | Jumlah Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                     | 87 Dokumen | 87 Dokumen | 100 |
| 3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                          | 120962.217   | 90.012.808  | 74.41 | SILPA | Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                               | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 100 |
| 3.3 | Konsolidasi Laporan Keuangan, SKPD, Blud dan Laporan Keuangan Pemerintah                                                                                      | 102.532.750  | 90.027.750  | 87.80 | SILPA | Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan, SKPD, Blud dan Laporan Keuangan                                                                                      | 6 Laporan  | 6 Laporan  | 100 |



|     |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |       |                                 |                                                                                                         |             |             |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|     | Daerah                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |       |                                 | Pemerintah Daerah                                                                                       |             |             |     |
| 3.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 249.212857      | 236.960.710     |       | SILPA                           | Jumlah Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                     | 10 Laporan  | 10 Laporan  | 100 |
| 4.  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | 515.999.751.000 | 501.972.024.334 | 97.28 | DAU, Dana Desa, SILPA, PAD, DBH | Prosentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan | 100%        | 100%        | 100 |
| 4.1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | 486.069.096.000 | 473.416.628.000 | 97.40 | DAU, Dana Desa                  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                               | 325 Laporan | 325 Laporan | 100 |
| 4.2 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 11.505.000.000  | 10.129.741.334  | 88.05 | DAU, SILPA, PAD                 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                              | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 100 |
| 4.3 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 18.425.655.000  | 18.425.655.000  | 100   | dbh, pad                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                         | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 100 |
| C   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | 2.744.573.475   | 2.622.847.226   | 95.56 | pajak rokok, silpa,             | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                   | 84          | 84          | 100 |



|     |                                                                   |               |               |       | dau                     |                                                                                                       |             |             |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1   | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                   | 2.744.573.475 | 2.622.847.226 | 95.56 | pajak rokok, silpa, dau | Prosentase Barang Milik Daerah yang dikelola                                                          | 84%         | 84%         | 88,94 |
| 1.1 | Penyusunan Standar Harga                                          | 123.101.000   | 121.454.493   | 98.56 | pajak rokok, dau        | Jumlah standar harga yang disusun                                                                     | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 100   |
| 1.2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah              | 22.615.000    | 20.423.500    |       | pajak rokok, dau        | Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah                                                          | 87 Laporan  | 87 Laporan  | 100   |
| 1.3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                 | 562.768.125   | 552.764.040   | 98.22 | pajak rokok, dau        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                      | 261 Laporan | 261 Laporan | 100   |
| 1.4 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                 | 80.606.000    | 74.381.000    | 92.28 | pajak rokok, dau        | Jumlah Laporan Hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                          | 87 Laporan  | 87 Laporan  | 100   |
| 1.5 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                    | 1.139.984.350 | 1.072.686.423 | 94.10 | pajak rokok, silpa, dau | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | 500 Laporan | 123 laporan | 24.6  |
| 1.6 | Penilaian Barang Milik Daerah                                     | 660.952.500   | 651.743.110   | 98.61 | pajak rokok, silpa      | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100   |
| 1.7 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan | 154.546.500   | 129.394.660   | 83.73 | pajak roko,             | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,                                            | 6 Dokumen   | 6 Dokumen   | 100   |



|     |                                                                                                                           |               |               |       |                    |                                                                                     |                |                |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|     | Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                           |               |               |       | silpa              | Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan<br>Barang Milik Daerah                |                |                |     |
| D   | PROGRAM PENGELOLAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                      | 2.902.533.500 | 2.696.163.911 | 92.89 | pajak rokok, silpa | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)) Tahun Berjalan                 | 100%           | 100%           | 100 |
| 1   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | 2.902.533.500 | 2.696.163.911 | 92.89 | Pajak Rokok, SILPA | Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan                                  | 100%           | 100%           | 100 |
| 1.1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 550.872.000   | 511.263.440   | 92.81 | Pajak Rokok        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                | 15 Laporan     | 15 Laporan     | 100 |
| 1.2 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 253.359.700   | 245.216.123   | 96.79 | Pajak Rokok        | Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah | 503 Laporan    | 503 Laporan    | 100 |
| 1.3 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 422.682.400   | 338.723.490   | 80.14 | Pajak Rokok        | Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya                                        | 52 Objek pajak | 52 Objek pajak | 100 |
| 1.4 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | 201.691.400   | 185.016.160   | 91.73 | Pajak Rokok        | Jumlah Dokuemen Ketetapan Pajak Daerah                                              | 5000 dokumen   | 5000 dokumen   | 100 |
| 1.5 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | 422.389.000   | 397.269.705   | 94.05 | Pajak Rokok        | Jumlah Layanan dan Konsultasi pajak daerah                                          | 12 layanan     | 12 layanan     | 100 |
| 1.6 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | 62.800.000    | 58.987.200    | 93.93 | Pajak Rokok        | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  | 5000 dokumen   | 5000 Dokumen   | 100 |



|     |                                                                        |             |             |       |                    |                                                                                             |             |             |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 1.7 | Penagihan Pajak Daerah                                                 | 810.010.000 | 784.079.163 | 96.80 | Pajak Rokok, SILPA | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                     | 102 dokumen | 102 dokumen | 100 |
| 1.8 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah | 178.729.000 | 175.608.630 | 98.25 | Pajak Rokok        | Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah | 47 laporan  | 47 laporan  | 100 |



## A. ANALISA TABEL :

Pada Tahun Anggaran berjalan, BPPKAD melaksanakan 4 (empat) program utama dengan total alokasi anggaran sebesar ± **Rp550,60 miliar**, yang terealisasi sebesar ± **Rp529,70 miliar** atau mencapai rata-rata **96,20%** secara agregat tertimbang anggaran. Secara umum, kinerja BPPKAD menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan mayoritas indikator output mencapai **100%**, serta tingkat penyerapan anggaran yang tinggi pada program inti pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Rincian capaian program sebagai berikut:

### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi Rp26,50 miliar

Realisasi Rp20,23 miliar (76,35%)

Program ini mendukung operasional dan administrasi internal perangkat daerah. Seluruh indikator output tercapai 100%, termasuk penyusunan dokumen perencanaan, laporan keuangan, administrasi kepegawaian, serta pengadaan barang milik daerah penunjang.

Namun demikian, tingkat serapan anggaran relatif lebih rendah dibanding program lainnya. Hal ini disebabkan oleh:

- Efisiensi belanja operasional (jasa komunikasi, listrik, surat menyurat).
- Tidak terealisasinya beberapa kegiatan seperti penyediaan instalasi listrik (0%).
- Optimalisasi belanja pegawai sesuai kebutuhan riil.

Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran, meskipun perencanaan anggaran ke depan perlu lebih presisi agar tidak terjadi deviasi signifikan.

### II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Alokasi Rp518,45 miliar

Realisasi Rp504,15 miliar (97,24%)

Program ini merupakan program inti dengan proporsi anggaran terbesar (±94% dari total anggaran). Capaian kinerja menunjukkan: Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD 100%. Realisasi penyerapan APBD mencapai 95,31% (melampaui target 94,2%). Indeks pengalokasian, penyerapan, dan transparansi anggaran tercapai 100%. Penyaluran Dana Bantuan Keuangan terealisasi 97,40%. Dana Bagi Hasil terealisasi 100%. Capaian tersebut mencerminkan



pengelolaan fiskal daerah yang akuntabel, tepat waktu, serta mendukung stabilitas keuangan daerah.

### **III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Alokasi Rp2,74 miliar

Realisasi Rp2,62 miliar (95,56%)

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah tercapai pada nilai 84.

Sebagian besar kegiatan seperti penyusunan standar harga, penatausahaan, inventarisasi, dan penilaian barang milik daerah tercapai 100%.

Namun terdapat catatan pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian output 24,6% (123 dari target 500 laporan). Kondisi ini menjadi perhatian karena pengamanan aset merupakan aspek strategis dalam menjaga kekayaan daerah.

Secara keseluruhan, pengelolaan aset menunjukkan kinerja baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengamanan dan optimalisasi aset.

### **IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Alokasi Rp2,90 miliar

Realisasi Rp2,69 miliar (92,89%)

Program ini mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh indikator output tercapai 100%, termasuk:

- Penetapan 5.000 dokumen ketetapan pajak daerah.
- Pengolahan 503 laporan basis data pajak.
- Penagihan 102 dokumen pajak daerah.
- Penyesuaian NJOP terhadap 52 objek pajak.

Capaian ini menunjukkan optimalisasi sistem administrasi dan pengawasan pajak daerah berjalan efektif serta mendukung peningkatan PAD tahun berjalan.

## **B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari sisi efisiensi, beberapa kegiatan menunjukkan serapan rendah namun output tercapai penuh. Hal ini mengindikasikan:

1. Pengendalian belanja yang efektif.
2. Optimalisasi penggunaan sumber daya.
3. Adanya potensi perbaikan dalam estimasi perencanaan anggaran.



Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan rasio efisiensi yang baik dengan tingkat serapan di atas 90% dan capaian output 100%.

### **C. Permasalahan dan Kendala**

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ketidaktepatan estimasi belanja operasional pada program penunjang.
2. Rendahnya capaian kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah.
3. Beberapa kegiatan administrasi umum tidak terealisasi optimal.

### **D. Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut**

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis realisasi historis.
2. Penguatan sistem pengamanan dan monitoring aset daerah.
3. Digitalisasi administrasi dan arsip.
4. Reformulasi indikator kinerja berbasis outcome.

### **E. Kesimpulan Kinerja Tahun Berjalan**

Secara umum, kinerja BPPKAD pada Tahun Anggaran berjalan dapat dikategorikan **Sangat Baik**, dengan rata-rata capaian program di atas 90%, serta dukungan kuat terhadap stabilitas dan akuntabilitas keuangan daerah.

Ke depan, fokus peningkatan diarahkan pada penguatan tata kelola aset dan optimalisasi program penunjang internal untuk mendukung kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan.



### 3.4. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.

**TABEL 3.8**  
**EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

| No | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja                                          | Kinerja |           |           | Anggaran          |                   |           | Tingkat Efisiensi |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|    |                                                         |                                                            | Target  | Realisasi | Capaian % | Anggaran          | Realisasi         | Capaian % | ( 6 - 9 )         |
|    |                                                         |                                                            | 4       | 5         | 6         | 7                 | 8                 | 9         | 10                |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah              | 1       | 1.48      | 148%      | 26.503.850.599,02 | 20.234.692.707,00 | 76.35     | 71.65             |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100     | 97.80     | 97.80     | 1.051.785.592.00  | 867.797.608,00    | 82.51     | 15.29             |
|    |                                                         | Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | 70      | 87.3      | 124.71    |                   |                   |           | 42.2              |
|    |                                                         | Persentase Transparansi Pengelolaan                        | 100     | 58.62     | 58.62     |                   |                   |           | (- 23,89)         |



|  |  |                                |              |              |        |                  |                  |       |        |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------|------------------|-------|--------|
|  |  | Keuangan Daerah                |              |              |        |                  |                  |       |        |
|  |  | Prosentase Penyerapan Anggaran | 92           | 95.35        | 103.64 | 685.541.700,00   | 673.668.854,00   | 98.27 | 5.37   |
|  |  | Fleksibilitas Keuangan         | 2.20         | 2.08         | 102.97 | 714.892.824,00   | 635.937.768,00   | 88,96 | (- 20) |
|  |  | Solvabilitas Operasional       | 81.9         | 84.16        | 102.76 |                  |                  |       |        |
|  |  | Persentase Penilaian Opini BPK | 100          | 0            | 0      |                  |                  |       |        |
|  |  | Solvabilitas Jangka Panjang    | 15.69        | 0            | 0      | 2.744.573.475,00 | 2.622.847.226,00 | 95,56 | 48     |
|  |  | Indek Solvabilitas Layanan     | 2.301.246.61 | 2.220.624,74 | 96.50  |                  |                  |       |        |
|  |  | Solvabilitas Jangka Pendek     | 100          | 337,13       | 337,13 |                  |                  |       |        |



|  |  |                                                 |       |       |        |                  |                  |       |       |
|--|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|------------------|-------|-------|
|  |  | Prosentase<br>Kemandirian<br>Keuangan<br>Daerah | 16.31 | 17.80 | 109.14 | 2.902.533.500,00 | 2.696.163.911,00 | 92,81 | 16.33 |
|--|--|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|------------------|-------|-------|



## A. ANALISA TABEL :

### I. Sasaran Strategis I (**Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah**)

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah masuk dalam kategori Sangat Berhasil dan Efisien. Perangkat daerah berhasil membuktikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola (LHE AKIP) tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya serapan anggaran, melainkan lebih pada kualitas pelaksanaan program.

Untuk perencanaan tahun berikutnya, pagu anggaran dapat ditinjau kembali agar lebih presisi (mendekati angka Rp 20 Miliar) sehingga alokasi dana sisanya dapat dialihkan untuk program strategis lainnya

### II. Sasaran Strategis II (**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**)

Sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja yang mencerminkan kualitas perencanaan, penganggaran, transparansi, dan kesehatan fiskal daerah. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Realisasi anggaran sebesar 82,51% dengan tingkat efisiensi 11,2 menunjukkan penggunaan anggaran yang relatif efektif dengan capaian mendekati target. Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD, indikator ini melampaui target sebesar 24,71%, menunjukkan komitmen kuat dalam pengalokasian anggaran sesuai prioritas pembangunan. Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian masih rendah karena ada dokumen laporan penatausahaan masih dalam pemeriksaan BPK. Persentase Penyerapan Anggaran, Realisasi anggaran mencapai 98,27% dengan efisiensi 5,37. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat waktu. Fleksibilitas Keuangan, Meskipun capaian dinilai baik, efisiensi negatif (-20) mengindikasikan perlunya pengelolaan ruang fiskal yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan belanja. Solvabilitas Operasional, Menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional secara sehat. Persentase Penilaian Opini BPK, Realisasi belum tersedia karena opini diterbitkan setelah pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran berakhir. Solvabilitas Jangka Panjang, Indikator belum tercapai dan memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait kemampuan pemenuhan kewajiban jangka panjang. Indeks Solvabilitas Layanan, Capaian mendekati target dan menunjukkan stabilitas kemampuan pembiayaan layanan publik. Persentase Kemandirian Keuangan Daerah, Realisasi anggaran sebesar 92,81% dengan efisiensi 16,33. Hal ini menunjukkan peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.



### 3.5. INOVASI

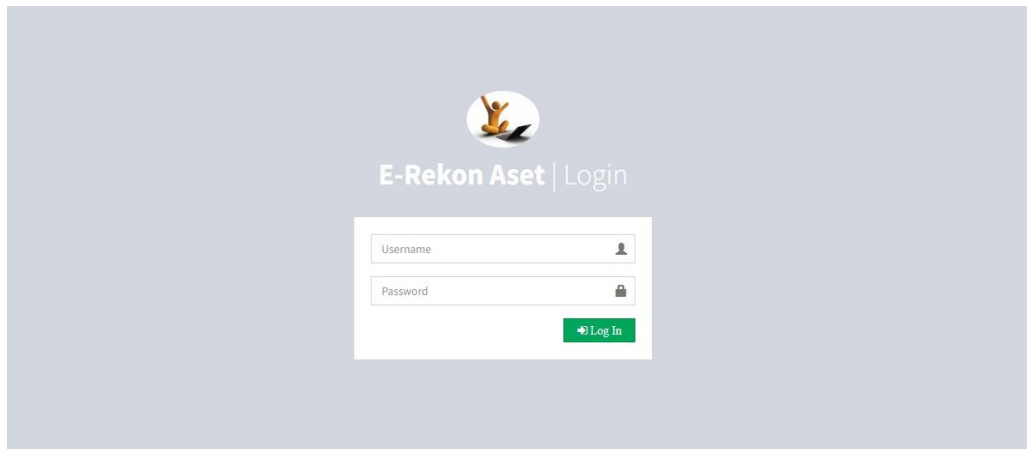
#### 1. Aplikasi “GEMULAY” (Gerai Elektronisasi Kemudahan Layanan).

Merupakan aplikasi pembayaran pajak daerah Kabupaten Probolinggo yang digunakan mulai pada tahun 2025 . Aplikasi penuh dengan kemudahan proses pembayaran pajak daerah.



## 2. APLIKASI E- REKON BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Untuk pelaksanaan rekonsiliasi aset, rkbmd, perubahan rkbmd dengan OPD seluruh Kabupaten Probolinggo.



## 3. Aplikasi SAE ASETKU



SAE ASETKU (sistem aplikasi terintegrasi pajak mobil dinas /sewa lelang tanah yang berkualitas) adalah sistem terpadu yang mendukung pengelolaan pajak kendaraan dinas, pemanfaatan aset melalui sewa, serta pelaksanaan lelang aset daerah secara digital dan terstandar. Aplikasi ini mengintegrasikan informasi dan proses administrasi yang berkaitan dengan tanah, kendaraan dinas, sewa tanah/bangunan, dan lelang aset

## 4. Launching aplikasi LOKET SAE

LOKET SAE merupakan layanan terpadu pengelolaan administrasi keuangan daerah yang memfasilitasi proses:



- SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- SPM (Surat Perintah Membayar)
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Melalui sistem ini, alur pencairan dana menjadi lebih terintegrasi dalam satu loket pelayanan. Selain itu, Loker SAE telah mendukung Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen SP2D, sehingga proses pengesahan dapat dilakukan secara digital tanpa harus menunggu tanda tangan manual. Loker sae menyederhanakan layanan kepada opd sehingga opd tidak perlu mengantar berkas spm dan spp ke BPPKAD. Dengan adanya LOKET SAE layanan sp2d jadi lebih cepat dan dapat di pantau proses nya secara real-time

**Konfirmasi Transfer SP2D Online**

35.13/04.0/000006/UP/7.01.0.00.0.00.18.0 ...  
Tanggal: 18 Februari 2026

**Transfer Langsung**  
Transfer akan dilakukan secara real-time

**Transfer Nanti**  
Jadwalkan waktu transfer

Kapan Anda ingin dokumen ini ditransfer ?  
18 February 2026 - 11:00

**Informasi Pengirim**

Nomor Rekening: 0131000100  
Nama Bank: Bank JATIM

**Informasi Penerima**

Nama Bank: Bank JATIM  
Nomor Rekening: 0131015976  
Nama Rekening: BEND PENGL KEC PAKUNIRAN

**Informasi Detail SP2D**

Tahun: 2026  
Bulan: Februari  
Jenis: Uang Persediaan  
Nama SKPD: Kecamatan Pakuniran  
Nomor SP2D: 35.13/04.0/000006/UP/7.01.0.00.0.00.18.0000/M/2/2026  
Nomor NPWP SKPD: 001402262625000  
Nilai SP2D: Rp30.000.000,00

☐ Semua data sudah sesuai dan benar

### 3.6 PENGHARGAAN

1. Laporan Keuangan Daerah (LKD TA 2024) dengan predikat “WTP” ke 12.



2. Pengelolaan dana DAK FISIK Terbaik Tahun Anggaran 2025 Lingkup Wilayah Jawa Timur



3. Peringkat 1 Nasional dalam hal realisasi belanja daerah pada APBD sebesar 87,54 persen dinobatkan sebagai yang terbaik di Indonesia. Tak hanya belanja, pengelolaan pendapatan daerah pun Kabupaten Probolinggo mencatatkan realisasi pendapatan hingga 96,23 persen, melampaui rata-rata capaian nasional.



#### 4. Implementasi Penggunaan SP2D Online Urutan Ke-3 Sejatim Tahun 2025

#### 5. Pelayanan Jemput bola dan fasilitasi pembayaran Digital dengan GEMULAY peringkat 3 **INODA** Kabupaten Probolinggo tahun 2025



#### 6. Penghargaan BPPKAD Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo dengan Kategori BB (Sangat Baik) Tahun 2025 dalam penataan arsip.



7. Penghargaan BPPKAD Sebagai Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang seluruh ASN nya sudah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 (Tingkat Kepatuhan 100%)





## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

Realisasi kinerja dan anggaran BPPKAD Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Tingkat serapan anggaran pada sebagian besar program berada pada kategori tinggi ( $\geq 90\%$ ), mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang relatif efektif dan terkendali.

Beberapa indikator kinerja utama terkait peningkatan nilai LHE AKIP, stabilitas fiskal, seperti fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas layanan, dan penyerapan anggaran, telah mencapai bahkan melampaui target Renstra 2029. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas dan kapasitas fiskal daerah dalam keadaan kuat.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum optimal, terutama pada transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta kemandirian fiskal. Meskipun dukungan anggaran tersedia, dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi PAD belum sepenuhnya maksimal.

#### **4.2 Saran**

Untuk meningkatkan realisasi anggaran dan capaian IKU pada tahun selanjutnya, diperlukan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran agar setiap alokasi anggaran selaras dengan target kinerja serta menerapkan prinsip money follow program dan penganggaran berbasis outcome.
2. Peningkatan kualitas SAKIP dan akuntabilitas kinerja, melalui penyempurnaan indikator, cascading kinerja, serta monitoring dan evaluasi berbasis hasil.
3. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta digitalisasi sistem pemungutan.
4. Peningkatan transparansi dan pengendalian internal, termasuk publikasi realisasi anggaran secara berkala dan penguatan manajemen risiko.
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kualitas pelaporan.



Dengan strategi tersebut, diharapkan realisasi anggaran tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Probolinggo, 28 Februari 2026  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP.19730215 199302 2 002



## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TA 2025  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M  
NIP. : 19730215 199302 2 002  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr.MOHAMMAD HARIS  
Jabatan : BUPATI PROBOLINGGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
BUPATI PROBOLINGGO



Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

  
**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730215 199302 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TA 2025**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | TARGET                  |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                        | (4)                     |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | 1 %                     |
| 2.. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah      | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100 %                   |
|     |                                                        | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | 70 %                    |
|     |                                                        | Prosentase Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah        | 100 %                   |
|     |                                                        | Prosentase Penyerapan Anggaran                             | 92 %                    |
|     |                                                        | Fleksibilitas Keuangan                                     | 2.02 %                  |
|     |                                                        | Solvabilitas Operasional                                   | 81.9 %                  |
|     |                                                        | Persentase Penilaian Opini BPK                             | 100 %                   |
|     |                                                        | Solvabilitas Jangka Panjang                                | 15.69 %                 |
|     |                                                        | Solvabilitas Layanan                                       | Rp.<br>2.301.246.61/org |
|     |                                                        | Solvabilitas Jangka Pendek                                 | 100 %                   |
|     |                                                        | Prosentase Kemandirian Keuangan                            | 16.31 %                 |



| NO | PROGRAM                                                                     | ANGGARAN                      | KETERANGAN<br>(SUMBER<br>ANGGARAN) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota           | Rp. 26.503.650.850.599,02     | DAU/PAD                            |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan<br>Daerah                                      | Rp. 518.468.971.116,00        | DAU/ Pajak<br>Rokok                |
|    | a) Koordinasi dan Penyusunan<br>Rencana Anggaran Daerah                     | Rp. 1.051.765.592,00          | DAU/ Pajak<br>Rokok                |
|    | b) Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                      | Rp. 685.541.700,00            | DAU/ Pajak<br>Rokok                |
|    | c) Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah | Rp. 714.892.824,00            | DAU/ Pajak<br>Rokok                |
|    | d) Penunjang Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan Daerah<br>(PPKD)     | Rp. 516.016.751.000,00        | DAU/ Pajak<br>Rokok                |
| 3  | Program Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                  | Rp. 2.744.573.475,00          | Silpa/Pajak<br>Rokok/DAU           |
| 4  | Program Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                    | Rp. 2.902.533.500,00          | Silpa/Pajak<br>Rokok/DAU           |
|    | <b>Total!</b>                                                               | <b>Rp. 550.619.928.690,02</b> |                                    |

Pihak Kedua,  
BUPATI PROBOLINGGO

  
**dr. MOHAMMAD HARIS**

Probolinggo, 01 Oktober 2025  
Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

  
**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730215 199302 2 002



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA APBD TA. 2026**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

| No | Sasaran Strategis                                  | Indikator                                                  | Target Tahunan       | Target tribulan |    |     |    | Keterangan                    |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----|-----|----|-------------------------------|
|    |                                                    |                                                            |                      | I               | II | III | IV |                               |
| 1  | Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | 1 %                  | -               | -  | -   | v  | Penilaian di tahun berikutnya |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100%                 | v               | -  | -   | -  | RPJMD, RKPd, KUAPPAS, APBD    |
|    |                                                    | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | 75%                  | v               | -  | -   | -  | APBD                          |
|    |                                                    | Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah        | 100 %                | v               | -  | v   | v  | APBD-PAPBD-LKD                |
|    |                                                    | Prosentase Penyerapan Anggaran                             | 92.5 %               | v               | v  | v   | v  | LRA                           |
|    |                                                    | Fleksibilitas Keuangan                                     | 2.05                 | v               | v  | v   | v  | LKD                           |
|    |                                                    | Solvabilitas Operasional                                   | 82                   | v               | v  | v   | v  | LKD                           |
|    |                                                    | Persentase Penilaian Opini BPK                             | 100 %                | -               | -  | -   | v  | LKD                           |
|    |                                                    | Solvabilitas Jangka Panjang                                | 7                    | -               | -  | -   | v  | LKD                           |
|    |                                                    | Solvabilitas Layanan                                       | 2.488.165.39 Rp/ org | -               | -  | -   | v  | LKD                           |
|    |                                                    | Solvabilitas Jangka Pendek                                 | 100 %                | v               | v  | v   | v  | LKD                           |
|    |                                                    | Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah                     | 17.33 %              | v               | v  | v   | v  | LKD                           |



## 2. Penetapan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (DO IKU)

### DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

| NO | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                              | FORMULASI PERHITUNGAN           | KETERANGAN (SUMBER DATA DAN DASAR REGULASI) |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                          | 4                                                                                                                                 | 5                               | 6                                           |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | LHE AKIP adalah; adalah dokumen yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah | Penilaian AKIP oleh Inspektorat | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran        |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran |                                                                                                                                   |                                 |                                             |

|  |  |                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Indek Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2 IPKD) | Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD | a) Anggaran Pendidikan Sebesar 20% Dari Apbd<br>b) Anggaran Kesehatan Sebesar 10% Dari Apbd, di luar gaji<br>c) Anggaran Infrastruktur Paling Sedikit Sebesar 25% Dari Dana Transfer Umum (DTU)<br>d) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota dikurangi Dana Alokasi Khusus | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 2) |
|--|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | Indek Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah (Dimensi 3 IPKD) , adalah :<br>Penyampaian Informasi Keuangan Kepada Masyarakat Luas (Warga), Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pemerintah, Kepatuhan Pemerintah Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Yang Berlaku, Dan Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan | Bukti Upload 29 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah di website Pemerintah Daerah dengan rentang waktu upload maksimal 30 hari tanggal penetapan. | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 3) |
|--|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Prosentase Penyerapan Anggaran | Indek <u>Penyerapan Anggaran</u> APBD (Dimensi 4 IPKD) , adalah : Pencapaian Dari Suatu Estimasi Yang Hendak Dicapai Selama Periode Waktu Tertentu Yang Dipandang Pada Suatu Saat Tertentu (Realisasi Dari Anggaran). | Persentase Penyerapan Anggaran Belanja dengan Realisasinya dengan batas minimal 80% dari anggaran | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 4) |
|  |  | Fleksibilitas Keuangan         | Indek <u>Fleksibilitas Keuangan</u> (Dimensi 5 IPKD) , adalah : Tingkat Kapasitas Dan Kecepatan Pemerintah Daerah Untuk Dapat Memobilisasi Sumber Daya                                                                | $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK}}{\text{Total kewajiban} - \text{belanja pegawai}}$    | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |



|  |  |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Solvabilitas Operasional    | <b>Solvabilitas Operasional (%) :</b><br>Rasio antara total pendapatan daerah dengan total belanja operasi, menunjukkan kemampuan keuangan daerah membiayai kebutuhan operasional rutin.  | $\frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\text{Belanja Operasional}} \times 100$ | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |
|  |  | Solvabilitas Jangka Panjang | <b>Solvabilitas Jangka Panjang (%) :</b><br>Rasio kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang terhadap aset yang dimiliki, menunjukkan keberlanjutan fiskal daerah. | $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban jangka panjang}} \times 100$   | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |

|  |  |                                |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                | Keuangannya Atau Mengambil Tindakan Secara Preventif, Reaktif, Dan Eksploitatif Agar Dapat Memaksimalkan Keuangan Daerah.                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |
|  |  | Persentase Penilaian Opini BPK | <b>Persentase Penilaian Opini BPK ;</b><br>Persentase pencapaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (target WTP: Wajar Tanpa Pengecualian). | $\frac{\text{Jumlah tahun dg opini WTP}}{\text{Jumlah tahun evaluasi}} \times 100$ | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |



## 3. Renaksi

|  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |  |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Solvabilitas Layanan       | <b>Solvabilitas Layanan (Rupiah) ;</b><br>Rasio atau besaran kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan layanan publik (alokasi belanja untuk pelayanan dasar) terhadap total kebutuhan masyarakat<br>$\frac{\text{Belanja layanan publik}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |  |  | Persentase Kemandirian Keuangan Daerah | <b>Indek <u>Kemandirian</u> <u>keuangan</u> (Dimensi 5 IPKD) , adalah :</b><br>Kemampuan Daerah Dalam Membiayai Keperluan Belanja Dengan Mengurangi Ketergantungan Dari Pihak Luar Atau Dalam Hal Ini Adalah Pemerintah Pusat<br>$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total}} \times 100$ | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |
|  |  | Solvabilitas Jangka Pendek | <b>Solvabilitas Jangka Pendek :</b><br>Rasio kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki<br>$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban jgk pendek}} \times 100$                                                                | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 5) |  |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |

| TUJUAN                                                                                                   | SASARAN                                               | PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/AKTIFITAS                                                            | PELAKSANAAN (TRIWULAN) |    |     |     |       | KETERANGAN                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                       |                                                                                                    | I                      | II | III | IV  | Total |                                                        |
|                                                                                                          |                                                       |                                                                                                    | %                      | %  | %   | %   | %     |                                                        |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, BMD dan Pendapatan daerah | 1. Meningkatkan tatakelola birokrasi perangkat daerah | PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                        |    |     |     |       |                                                        |
|                                                                                                          |                                                       | KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                          |                        |    |     |     |       |                                                        |
|                                                                                                          |                                                       | SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                        |    |     |     |       |                                                        |
|                                                                                                          |                                                       | Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan                                                          | 10                     | 10 | 50  | 30  | 100   | Menghadiri Rapat - Rapat Perencanaan                   |
|                                                                                                          |                                                       | Rapat Pengumpulan Data Dukung Penyusunan Dokumen Perencanaan                                       | 25                     | 25 | 25  | 25  | 100   | Rapat Di dalam BPPKAD                                  |
|                                                                                                          |                                                       | Cetak Dokumen Perencanaan                                                                          | 40                     | 30 | 10  | 20  | 100   | Dokumen LKJiP, SIRUP dan                               |
|                                                                                                          |                                                       | Study Tiru penyusunan dokumen IPKD                                                                 | -                      | -  | 100 | -   | 100   | Ke Kab/Kota Peraih Nilai IPKD terbaik                  |
|                                                                                                          |                                                       | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)                                                                   | -                      | -  | -   | 100 | 100   | Di laksanakan di nulan Oktober oleh pihak ketiga       |
|                                                                                                          |                                                       | SUB KEGIATAN Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                |                        |    |     |     | -     | Cetak Dokumen RKA dan DPA (Murni)                      |
|                                                                                                          |                                                       | Cetak Dokumen RKA dan DPA (Murni)                                                                  | 50                     | -  | -   | 50  | 100   | Cetak Dokumen RKA dan DPA (Pergeseran Anggaran)        |
|                                                                                                          |                                                       | Cetak Dokumen RKA dan DPA (Pergeseran Anggaran)                                                    | 30                     | 70 | -   | -   | 100   | Cetak Dokumen RKA dan DPA (Perubahan Anggaran)         |
|                                                                                                          |                                                       | Cetak Dokumen RKA dan DPA (Perubahan Anggaran)                                                     | -                      | -  | 100 | -   | 100   |                                                        |
|                                                                                                          |                                                       | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                        |    |     |     | -     |                                                        |
|                                                                                                          |                                                       | Rapat Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja ASN BPPKAD                                             | 25                     | 25 | 25  | 25  | 100   | Rapat Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja ASN BPPKAD |



|  |  |                                                                  |    |     |     |    |     |                                                   |
|--|--|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---------------------------------------------------|
|  |  | Cetak Dokumen Perjanjian Kinerja ASN BPPKAD                      | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Cetak Dokumen Perjanjian Kinerja ASN BPPKAD       |
|  |  | Cetak Laporan Capaian Kinerja (CAPKIN) ASN BPPKAD                | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Cetak Laporan Capaian Kinerja (CAPKIN) ASN BPPKAD |
|  |  |                                                                  |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja Gaji dan Tunjangan                                       | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Gaji dan Tunjangan ASN                            |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja pakaian olahraga                                         |    |     | 100 |    | 100 | Seragam pakaian olahraga                          |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                 |    |     | 50  | 50 | 100 | Bimtek peningkatan SDM Aparatur                   |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja Bahan Kegiatan Kantor                                    |    |     | 50  |    | 50  | Lampu, Tap Konektor, dan Kabel LAN                |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor          | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Tinta, Catridge, dan Toner                        |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor          | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Tinta, Catridge, dan Toner                        |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |    |     |     |    | -   |                                                   |
|  |  | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                   |    | 100 |     |    | 100 | Cangkir, Garpu, Gelas, Piring, dan Sendok         |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |    |     |     |    | -   |                                                   |



|  |  |                                                                     |    |     |     |     |     |                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Penyediaan makanan dan minuman                                      | 25 | 25  | 25  | 25  | 100 | Aqua, Gula, Kopi, Snack                                                                                 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | Pengadaan barang cetak dan penggandaan                              |    | 100 |     |     | 100 | Amlop, Box arsip, dan Stop map                                                                          |
|  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | Rapat Pengelolaan & Penataan Keuangan Kunjungan Tamu                | 50 | 50  |     |     | 100 | Rapat, Sosialisasi, dan Koordinasi Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPD RI  |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi SIPD RI                          |    |     | 100 |     | 100 | Bimtek, Sosialisasi, dan Koordinasi Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPD RI |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | Belanja Kendaraan Bermotor Perorangan                               | 50 | 50  |     |     | 100 | Pengadaan Avanza, Hilux, Vario                                                                          |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | Belanja Kendaraan Bermotor Perorangan                               |    |     |     | 100 | 100 | Trail                                                                                                   |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                 |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah      |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | ✓  |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | AKTIFITAS ...                                                       |    |     |     |     | -   |                                                                                                         |
|  |  | -Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan            | -  | 50  | 50  | -   | 100 | -Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                |



|  |  |  |                                                                              |    |    |     |    |     |                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                       | -  | -  | 100 | -  | 100 | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                     |
|  |  |  | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                           | 13 | 27 | 50  | 10 | 100 | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                         |
|  |  |  | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                   | 50 | -  | 50  | -  | 100 | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                 |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | 25 | 25 | 25  | 25 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           |
|  |  |  |                                                                              |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  |  | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah               |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  |  | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  |  | AKTIFITAS ...                                                                |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  |  | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                       | -  | -  | 100 | -  | 100 | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                     |
|  |  |  | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                           | 25 | 25 | 25  | 25 | 100 | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                         |
|  |  |  | -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia   | -  | 50 | 50  | -  | 100 | -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia |
|  |  |  | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                   | 25 | 50 | 25  | -  | 100 | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                 |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                             | 19 | 31 | 37  | 13 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           |
|  |  |  |                                                                              |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  |  | 5.02.02.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah                      |    |    |     |    | -   |                                                                            |



|  |  |                                                                                                                               |    |    |     |    |     |                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|----------------------------------------------------------|
|  |  | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |    |    |     |    | -   |                                                          |
|  |  | AKTIFITAS ...                                                                                                                 |    |    |     |    | -   |                                                          |
|  |  | -Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                      | 75 | 25 | -   | -  | 100 | -Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
|  |  | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                        | 7  | -  | 70  | 23 | 100 | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |
|  |  | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                            | 50 | -  | 25  | 25 | 100 | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                       |
|  |  | -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                   | 9  | -  | 78  | 12 | 100 | Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia          |
|  |  | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                                                    | 5  | -  | -   | 95 | 100 | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |
|  |  | -Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                           | 33 | -  | 33  | 33 | 100 | -Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                      |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                              | 13 | 17 | 30  | 39 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         |
|  |  |                                                                                                                               |    |    |     |    | -   |                                                          |
|  |  | 5.02.02.2.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah                                                                       |    |    |     |    | -   |                                                          |
|  |  | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |    |    |     |    | -   |                                                          |
|  |  | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                        | -  | -  | 77  | 23 | 100 | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |
|  |  | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                            | 14 | 21 | 51  | 14 | 100 | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                       |
|  |  | -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                   | -  | -  | 100 | -  | 100 | Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia          |



|  |  |                                                                                      |    |    |     |    |     |                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                           | -  | -  | 50  | 50 | 100 | -Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                 |
|  |  | -Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                  | -  | -  | 100 | -  | 100 | -Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                        |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                     | -  | 4  | 53  | 43 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                | 19 | 27 | 27  | 27 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                      |
|  |  |                                                                                      |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                       |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  | 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |    |    |     |    | -   |                                                                            |
|  |  | -Belanja HonorariumPenanggungjawaban PengelolaKeuangan                               | -  | -  | 25% | 1  | 1   | -Belanja HonorariumPenanggungjawaban PengelolaKeuangan                     |
|  |  | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                   | 37 | 45 | 18  | -  | 100 | -Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                         |
|  |  | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                               | 12 | 25 | 52  | 12 | 100 | -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                     |
|  |  | -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia           | -  | 22 | 78  | -  | 100 | -Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia |
|  |  | -Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan                               | -  | 0% | 100 | -  | -   | -Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan                     |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 25 | 25 | 25  | 25 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                           |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                | 20 | 30 | 30  | 21 | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                      |



|  |                                                                                                                             |  |    |     |     |    |     |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
|  | KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH                                                 |  |    |     |     |    | -   |                                                                 |
|  | SUB KEGIATAN REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN |  |    |     |     |    | -   |                                                                 |
|  | AKTIVITAS ...                                                                                                               |  |    |     |     |    | -   |                                                                 |
|  | - Rekonsiliasi Pendapatan Daerah                                                                                            |  | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                                     |
|  | - Rekonsiliasi Pendapatan BLUD                                                                                              |  | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                                     |
|  | - Rekonsiliasi Belanja Daerah                                                                                               |  | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                                     |
|  | - Rekonsiliasi Persediaan Barang Habis Pakai                                                                                |  | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                                     |
|  | - Pengadaan Aplikasi SIPERDA berbasis Website                                                                               |  |    | 100 |     |    | 100 | Belanja Modal                                                   |
|  | - Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi SIPERDA berbasis Website                                                           |  |    |     | 100 |    | 100 | Belanja Makanan dan Minuman; Belanja Jasa Honorarium Narasumber |
|  | SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN           |  |    |     |     |    | -   |                                                                 |
|  | AKTIVITAS ...                                                                                                               |  |    |     |     |    | -   |                                                                 |
|  | - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah                                                    |  |    |     | 100 |    | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                                     |
|  | - Cetak Buku Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah                                                    |  |    |     | 100 |    | 100 | Belanja Cetak                                                   |
|  | - Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah ke BPPKAD Provinsi                                |  |    |     | 100 |    | 100 | Belanja Perjalanan Dinas                                        |
|  |                                                                                                                             |  |    |     |     |    | -   |                                                                 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |  |     |                                                       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|-----|-------------------------------------------------------|
|  |  | SUB KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                                                              |     |     |     |  | -   |                                                       |
|  |  | AKTIVITAS ...                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |  | -   |                                                       |
|  |  | - Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited)                                                                                                                                                                              | 100 |     |     |  | 100 | Belanja Makanan dan Minuman; Belanja Perjalanan Dinas |
|  |  | - Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited)                                                                                                                                                                                | 100 |     |     |  | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                           |
|  |  | - Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited) ke BPK RI Jatim                                                                                                                                                             | 100 |     |     |  | 100 | Belanja Perjalanan Dinas                              |
|  |  | - Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited) ke BPK RI Jatim                                                                                                                                                               |     | 100 |     |  | 100 | Belanja Perjalanan Dinas                              |
|  |  | - Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                    |     |     | 100 |  | 100 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Daerah    |
|  |  | - Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  |     |     | 100 |  | 100 | Belanja Makanan dan Minuman; Belanja Jasa Konsultansi |
|  |  | - Cetak Buku Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  |     |     | 100 |  | 100 | Belanja Cetak                                         |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |  | -   |                                                       |
|  |  | SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA |     |     |     |  | -   |                                                       |
|  |  | AKTIVITAS ...                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |  | -   |                                                       |
|  |  | - Cetak LKPD (Unaudited)                                                                                                                                                                                                                 | 100 |     |     |  | 100 | Belanja Cetak                                         |
|  |  | - Cetak LKPD (Audited)                                                                                                                                                                                                                   |     | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                         |



|                                         |  |  |                                                                                                              |   |     |     |  |     |                                                         |
|-----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|-----|---------------------------------------------------------|
|                                         |  |  | - Cetak Buku LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)                                                                 |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                           |
|                                         |  |  | - Penyusunan RAPERDA dan RAPERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                             |
|                                         |  |  | - Cetak Buku RAPERDA dan RAPERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                           |
|                                         |  |  | - Penyampaian RAPERDA dan RAPERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke BPPKAD Provinsi Jawa Timur |   | 100 |     |  | 100 | Perjalanan Dinas                                        |
|                                         |  |  | - Cetak Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD                                                              |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                           |
|                                         |  |  | - Cetak Buku Jawaban PU Fraksi LKPD                                                                          |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                           |
|                                         |  |  | - Cetak Buku Pidato Akhir Pertanggungjawaban APBD                                                            |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                           |
|                                         |  |  | - Penyusunan PERDA dan PERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                    |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Makanan dan Minuman                             |
|                                         |  |  | - Cetak Buku PERDA dan PERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                    |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Cetak                                           |
|                                         |  |  | - Penyampaian PERDA dan PERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke BPPKAD Provinsi Jawa Timur     |   | 100 |     |  | 100 | Perjalanan Dinas                                        |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |  |  |                                                                                                              |   |     |     |  | -   |                                                         |
|                                         |  |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                              |   |     |     |  | -   |                                                         |
|                                         |  |  | Penyusunan Standar Harga                                                                                     |   |     |     |  | -   |                                                         |
|                                         |  |  | - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak                                                     |   | 100 |     |  | 100 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor<br>Bahan Cetak |
|                                         |  |  | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                          | 0 | 100 |     |  | 100 | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                     |
|                                         |  |  | - Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kuangan                                                        |   | 100 |     |  | 100 | - Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kuangan   |
|                                         |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                             |   |     | 100 |  | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        |



|  |  |  |                                                                 |    |     |     |    |     |                                                               |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                           |    |     | 100 |    | 100 | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                         |
|  |  |  | PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH            |    |     |     |    | -   |                                                               |
|  |  |  | - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak        |    |     | 100 |    | 100 | Cetak Banner, Foto Copy A4                                    |
|  |  |  | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                             |    |     | 100 |    | 100 |                                                               |
|  |  |  | - Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKBMD Perubahan TA.2025 |    |     | 100 |    | 100 | Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKBMD Perubahan TA.2025 |
|  |  |  | - Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKBMD TA.2025           |    | 100 |     |    | 100 | Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKBMD TA.2025           |
|  |  |  | - Verifikasi RKBMD Perubahan TA. 2025                           |    |     | 100 |    | 100 | Verifikasi RKBMD Perubahan TA. 2025                           |
|  |  |  | - Verifikasi RKBMD TA. 2025                                     |    | 100 |     |    | 100 | Verifikasi RKBMD TA. 2025                                     |
|  |  |  |                                                                 |    |     |     |    | -   |                                                               |
|  |  |  | KEGIATAN Pengelolaan Barang Milik Daerah                        |    |     |     |    | -   |                                                               |
|  |  |  | SUB KEGIATAN Penatausahaan Barang Milik Daerah                  |    |     |     |    | -   |                                                               |
|  |  |  | AKTIFITAS ...                                                   |    |     |     |    | -   |                                                               |
|  |  |  | - Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                   |    | 100 |     |    | 100 | Stiker                                                        |
|  |  |  | - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak        |    | 100 | 0   | 0  | 100 | Cetak Banner, Foto Copy A4, Jilid Buku                        |
|  |  |  | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                             | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Rapat MCP KPK, Rekonsiliasi Aset                              |
|  |  |  | - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan              |    | 100 |     |    | 100 | Belanja Jasa Publikasi                                        |
|  |  |  | - Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya                            | 25 | 25  | 25  | 25 | 100 | Perpanjangan TS Printer, Sewa Hosting dan cloud System        |



LKjPD BPPKAD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2025

|  |  |  |                                                             |     |     |    |    |     |                                                                                                                                |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus |     | 100 |    |    | 100 | Jasa Konsultansi Pendampingan Aplikasi E- BMD                                                                                  |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                            | 100 | 0   | 0  |    | 100 | Perjalanan Dinas Luar Daerah, Tiket Pesawat, Biaya Penginapan                                                                  |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                       | 30  | 30  | 30 | 10 | 100 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                                                  |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota         | 100 |     |    |    | 100 | Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo Spesifikasi : FULLDAY                    |
|  |  |  | - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                |     | 100 |    |    | 100 | Aplikasi Pajak Kendaraan                                                                                                       |
|  |  |  |                                                             |     |     |    |    |     |                                                                                                                                |
|  |  |  | SUB KEGIATAN Pengamanan Barang Milik Daerah                 |     |     |    |    | -   |                                                                                                                                |
|  |  |  | - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   | 25  | 25  | 25 | 25 | 100 | Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan                                                                                           |
|  |  |  | - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi               | 0   | 100 |    |    | 100 | Belanja Pengadaan Patok Batas, Papan Nama Aset                                                                                 |
|  |  |  | - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak     | 100 | 0   |    |    | 100 | Belanja Materai, Belanja Cetak Map Sertifikasi Tanah                                                                           |
|  |  |  | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                         | 41  | 33  | 26 |    | 100 | Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pemanfaatan, Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah, Rapat Koordinasi Asuransi Gedung dan Bangunan |
|  |  |  | - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa   | 39  | 36  | 25 |    | 100 | Honorarium Narasumber                                                                                                          |



|  |  |  |                                                             |     |     |     |   |     |                                                                                                                                                      |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Acara, dan Panitia                                          |     |     |     |   |     |                                                                                                                                                      |
|  |  |  | - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                        |     | 100 |     |   | 100 | EO/Pameran Pemanfaatan BMD                                                                                                                           |
|  |  |  | - Belanja Jasa Pengukuran Tanah                             | 44  | 44  | 12  |   | 100 | Biaya Sertifikasi Tanah Spesifikasi : Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan                                                                              |
|  |  |  | - Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                      | 100 |     |     |   | 100 | Belanja Asuransi BMD                                                                                                                                 |
|  |  |  | - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                 |     |     | 100 |   | 100 | Sewa Bus Bimtek Penggunaan BMD setingkat eselon II (Jawa Tengah)                                                                                     |
|  |  |  | - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 100 |     |     |   | 100 | Pembuatan Video Spesifikasi : Video pemanfaatan BMD                                                                                                  |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                            | 100 | 0   | 0   |   | 100 | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                                                                         |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                       | 40  | 40  | 20  |   | 100 | Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                          |
|  |  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota         |     |     | 100 |   | 100 | Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Biaya Bimbingan teknis setingkat eselon II (JAWA TENGAH)                                                       |
|  |  |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                           |     |     |     |   | -   |                                                                                                                                                      |
|  |  |  | - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak    |     |     | 100 |   | 100 | Cetak Banner, Foto Copy A4                                                                                                                           |
|  |  |  | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                         |     | 0   | 100 | 0 | 100 | Apel Kendaraan Peserta, Desk Inventarisasi KIB, Rapat Desk dan Inventarisasi KIB, Rapat Koordinasi Tindak Lanjut BPK, Rapat Persiapan Apel Kendaraan |



|  |  |                                                                                              |     |    |     |    |     |                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                        |     |    | 100 |    | 100 | Rapat Koordinasi<br>Persiapan Penyusunan<br>RKBMD Perubahan<br>TA.2025                                   |
|  |  |                                                                                              |     |    |     |    |     |                                                                                                          |
|  |  | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                |     |    |     |    | -   |                                                                                                          |
|  |  | - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak                                     | 64  | 36 |     |    | 100 | Cetak Banner, Foto Copy<br>A4                                                                            |
|  |  | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                          | 50  | 50 |     |    | 100 | Rapat Hasil Penilaian<br>BMD                                                                             |
|  |  | - Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survey                                   | 40  | 40 | 0   |    | 80  | Jasa Appraisal                                                                                           |
|  |  | - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan                                    | 100 |    |     |    | 100 | Kajian Optimalisasi BMD                                                                                  |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                             | 37  | 37 | 26  |    | 100 | Belanja Perjalanan Dinas<br>Luar Daerah                                                                  |
|  |  | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                        | 100 | 0  |     |    | 100 |                                                                                                          |
|  |  | PROGRAM 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |     |    |     |    | -   |                                                                                                          |
|  |  | KEGIATAN 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                               |     |    |     |    | -   |                                                                                                          |
|  |  | Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                       |     |    |     |    | -   |                                                                                                          |
|  |  | Cetak Buku PDRD                                                                              |     |    |     |    | -   | Cetak Buku PDRD                                                                                          |
|  |  | Rapat Koordinasi Pengembangan Elektronifikasi Pajak Daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber) | 100 |    |     |    | 100 | Rapat Koordinasi<br>Pengembangan<br>Elektronifikasi Pajak<br>Daerah (Mamin dan<br>Honorarium Narasumber) |
|  |  | Pembuatan Video iklan mata pajak                                                             |     | 30 | 40  | 30 | 100 | Pembuatan Video iklan<br>mata pajak                                                                      |
|  |  | Pembuatan Naskah Peta Potensi Pajak Daerah                                                   |     |    | 100 |    | 100 | Pembuatan Naskah Peta<br>Potensi Pajak Daerah                                                            |



|  |  |                                                                                                     |     |     |     |     |     |                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Penyempurnaan Zona Nilai Tanah PBB                                                                  |     | 100 |     |     | 100 | Penyempurnaan Zona Nilai Tanah PBB                                                                  |
|  |  | Perbaikan IP Publik / Setting Jasa Pemeliharaan Maintenance Jaringan                                |     | 100 |     |     | 100 | Perbaikan IP Publik / Setting Jasa Pemeliharaan Maintenance Jaringan                                |
|  |  | Pengolahan Pemeliharaan dan Pengolahan                                                              |     | 100 |     |     | 100 |                                                                                                     |
|  |  | Cetak buku bukti kas penerimaan/penyetoran PBB petugas desa                                         |     |     |     |     | -   | Cetak buku bukti kas penerimaan/penyetoran PBB petugas desa                                         |
|  |  | Cetak SPPT                                                                                          |     |     |     |     | -   | Cetak SPPT                                                                                          |
|  |  | Rapat Koordinasi sinkronisasi data pengelolaan pajak daerah (MCP) (Mamin dan Honorarium Narasumber) |     | 50  | 50  |     | 100 | Rapat Koordinasi sinkronisasi data pengelolaan pajak daerah (MCP) (Mamin dan Honorarium Narasumber) |
|  |  | Pigura Kecil Foto penghargaan                                                                       | 100 |     |     |     | 100 | Pigura Kecil Foto penghargaan                                                                       |
|  |  | Sosialisasi Pengembangan sarana pembayaran Pajak (Mamin dan Honorarium Narasumber)                  |     |     |     | 100 | 100 | Sosialisasi Pengembangan sarana pembayaran Pajak (Mamin dan Honorarium Narasumber)                  |
|  |  | Koordinasi Pajak Daerah (Perjalanan Dinas)                                                          |     |     |     | 100 | 100 | Koordinasi Pajak Daerah (Perjalanan Dinas)                                                          |
|  |  | Penilaian PBB-P2 dan BPHTB                                                                          |     |     | 100 |     | 100 |                                                                                                     |
|  |  | Cetak SPOP LSPOP                                                                                    | 25  | 25  | 25  | 25  | 100 | Cetak SPOP LSPOP                                                                                    |
|  |  | Rapat koordinasi pemetaan potensi PBB dan BPHTB (Mamin dan Honorarium)                              |     | 50  |     | 50  | 100 | Rapat koordinasi pemetaan potensi PBB dan BPHTB (Mamin dan Honorarium)                              |



|  |  |  |                                                                                                                        |     |     |     |     |     |                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Narasumber)                                                                                                            |     |     |     |     |     | dan<br>BPHTB (Mamin dan<br>Honorarium Narasumber)                                                                                  |
|  |  |  | Rapat koordinasi peningkatan PAD (Mamin dan Honorarium<br>Narasumber)                                                  |     | 50  | 50  |     | 100 | Rapat koordinasi<br>peningkatan PAD (Mamin<br>dan Honorarium<br>Narasumber)                                                        |
|  |  |  | Koordinasi Pengawasan pengelolaan Pemetaan PBB dan BPHTB<br>(Perjalanan Dinas)                                         |     | 30  | 40  | 30  | 100 | Koordinasi Pengawasan<br>pengelolaan Pemetaan<br>PBB dan BPHTB<br>(Perjalanan Dinas)                                               |
|  |  |  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                           |     |     |     |     | -   |                                                                                                                                    |
|  |  |  | Cetak SPTPD                                                                                                            | 100 |     |     |     | 100 |                                                                                                                                    |
|  |  |  | Sosialisasi Kebijakan penetapan Pajak Daerah dan Pembagian SPPT<br>PBB di Kecamatan (Mamin dan Honorarium Narasumber)  |     | 100 |     |     | 100 | Cetak SPTPD                                                                                                                        |
|  |  |  | Penyusunan KebijakanTentang Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak<br>Daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber)         |     |     | 100 |     | 100 | Sosialisasi Kebijakan<br>penetapan Pajak Daerah<br>dan Pembagian SPPT<br>PBB di Kecamatan<br>(Mamin dan Honorarium<br>Narasumber)  |
|  |  |  | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber)        |     | 50  | 50  |     | 100 | Penyusunan<br>KebijakanTentang<br>Intensifikasi dan<br>ektensifikasi Pajak<br>Daerah (Mamin dan<br>Honorarium Narasumber)          |
|  |  |  | Apresiasi dan Penghargaan bagi Wajib Pajak terbaik (Honorarium<br>Narasumber, Half day, Pigura Kecil Foto penghargaan) |     |     |     | 100 | 100 | Pemeliharaan dan<br>Pemutakhiran Basis Data<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah (Mamin<br>dan Honorarium<br>Narasumber)        |
|  |  |  | Koordinasi Penyampaian Surat Ketetapan PBB (Perjalanan Dinas)                                                          | 25  | 25  | 25  | 25  | 100 | Apresiasi dan<br>Penghargaan bagi Wajib<br>Pajak terbaik (Honorarium<br>Narasumber, Half day,<br>Pigura Kecil Foto<br>penghargaan) |



|  |  |                                                                                   |     |     |    |    |     |                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                             |     |     |    |    | -   | Koordinasi Penyampaian Surat Ketetapan PBB (Perjalanan Dinas)                     |
|  |  | Seragam PDL pelayanan pajak daerah                                                |     | 100 |    |    | 100 | Seragam PDL pelayanan pajak daerah                                                |
|  |  | Profesionalisme pelayanan exelen pajak daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber)   |     | 40  | 30 | 30 | 100 | Profesionalisme pelayanan exelen pajak daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber)   |
|  |  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak DaerahDaerah                       |     |     |    |    | -   |                                                                                   |
|  |  | Cetak Stiker lunas/belum pajak daerah                                             |     | 40  | 30 | 30 | 100 | Cetak Stiker lunas/belum pajak daerah                                             |
|  |  | Verifikasi data laporan pembayaran pajak daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber) | 25  | 25  | 25 | 25 | 100 | Verifikasi data laporan pembayaran pajak daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber) |
|  |  | Verifikasi lapangan atas data pembayaran pajak daerah (Perjalanan Dinas)          |     | 50  | 50 |    | 100 | Verifikasi lapangan atas data pembayaran pajak daerah (Perjalanan Dinas)          |
|  |  | Penagihan Pajak Daerah                                                            |     |     |    |    | -   |                                                                                   |
|  |  | Meteran Laser bagi Kecamatan dan Desa yang Lunas                                  | 100 |     |    |    | 100 | Meteran Laser bagi Kecamatan dan Desa yang Lunas                                  |
|  |  | Monitoring dan evaluasi penagihan pajak daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber)  |     | 40  | 30 | 30 | 100 | Monitoring dan evaluasi penagihan pajak daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber)  |
|  |  | Penagihan Pajak Daerah (Perjalanan Dinas)                                         |     | 40  | 30 | 30 | 100 | Penagihan Pajak Daerah (Perjalanan Dinas)                                         |



|  |  |                                                                                      |     |     |     |    |     |                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Reward Pelunasan PBB                                                                 | 50  |     |     | 50 | 100 | Reward Pelunasan PBB                                                                 |
|  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah     |     |     |     |    | -   |                                                                                      |
|  |  | Rapat koordinasi peningkatan PAD (Mamin dan Honorarium Narasumber)                   |     |     | 100 |    | 100 | Rapat koordinasi peningkatan PAD (Mamin dan Honorarium Narasumber)                   |
|  |  | Rapat koordinasi pemetaan potensi retribusi daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber) | 100 |     |     |    | 100 | Rapat koordinasi pemetaan potensi retribusi daerah (Mamin dan Honorarium Narasumber) |
|  |  | Koordinasi Penyusunan tata kelola pajak daerah dan Retribusi Daerah (Pelan Dinas)    |     | 100 |     |    | 100 | Koordinasi Penyusunan tata kelola pajak daerah dan Retribusi Daerah (Pelan Dinas)    |
|  |  | Rapat Koordinasi Uji Publik Rancangan PDRD                                           |     | 100 |     |    | 100 | Rapat Koordinasi Uji Publik Rancangan PDRD                                           |



## 4. Bukti Perhitungan IKU

| Persentase Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah TA 2025 |                  |                      |        |              |                     |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------------|---------------------|-------|------------------|
| Nomor                                                           | URAIAN           | JUMLAH               | Sesuai | Tidak Sesuai | Jumlah/Program-Pagu | Nilai | NILAI PEMBOBOTAN |
| D.1.1                                                           | Program RPJMD    | 407                  | 407    | 0            | 407                 | 1.000 | 20               |
|                                                                 | Program RKPD     | 407                  |        |              |                     |       |                  |
| D.1.2                                                           | Program RKPD     | 407                  | 407    | 0            | 407                 | 1.00  | 20               |
|                                                                 | Program KUA-PPAS | 407                  |        |              |                     |       |                  |
| D.1.3                                                           | Program KUA-PPAS | 407                  | 407    | 0            | 407                 | 1.00  | 20               |
|                                                                 | Program APBD     | 407                  |        |              |                     |       |                  |
| D.1.4                                                           | Pagu RKPD        | 2,589,376,140,499.82 | 355    | 52           | 407                 | 87.22 | 18.5             |
|                                                                 | Pagu KUA-PPAS    | 2,592,208,378,891.00 |        |              |                     |       |                  |
| D.1.5                                                           | Pagu KUA-PPAS    | 2,592,208,378,891.00 | 373    | 34           | 407                 | 91.65 | 19.3             |
|                                                                 | Pagu APBD        | 2,599,009,478,833.12 |        |              |                     |       |                  |
|                                                                 |                  |                      |        |              |                     |       | 97.8             |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA                                          | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TW IV |                 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TW IV |                 | CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TW IV |        | TARGET TAHUNAN |                 | PROGRESS REALISASI TAHUNAN |        |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------------|--------|
|    |                                                         |                                                            | K                                 | Rp.             | K                                    | Rp.             | K                                  | Rp (%) | K              | Rp.             | K (%)                      | Rp (%) |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah | Persentase kenaikan LHE AKIP perangkat daerah              | 1 %                               |                 | 0 %                                  |                 | 0 %                                |        | 1 %            |                 | 0 %                        |        |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah       | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100 %                             |                 | 97.80 %                              |                 | 0.98 %                             |        | 100 %          |                 | 98 %                       |        |
|    |                                                         | Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD               | 70 %                              |                 | 87.30 %                              |                 | 1.25 %                             |        | 70.00 %        |                 | 125 %                      |        |
|    |                                                         | Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah        | 100.00 %                          |                 | 58.62 %                              |                 | 0.59 %                             |        | 100.00 %       |                 | 59 %                       |        |
|    |                                                         | Persentase Penyerapan Anggaran                             | 92.00 %                           |                 | 95.35 %                              |                 | 1.04 %                             |        | 92.00 %        |                 | 104 %                      |        |
|    |                                                         | Fleksibilitas Keuangan                                     | 2.20 %                            | 550,602,928,690 | 2.08 %                               | 529,703,132,408 | 0.95 %                             |        | 2.02 %         | 550,602,928,690 | 103 %                      | 96.20  |
|    |                                                         | Solvabilitas Operasional                                   | 81.9 %                            |                 | 84.16 %                              |                 | 1.03 %                             |        | 81.9 %         |                 | 103 %                      |        |
|    |                                                         | Persentase Penilaian Opini BPK                             | 100 %                             |                 | 0 %                                  |                 | - %                                |        | 100.00 %       |                 | 0 %                        |        |
|    |                                                         | Solvabilitas Jangka Panjang                                | 15.69 %                           |                 | 0 %                                  |                 | - %                                |        | 15.69 %        |                 | 0 %                        |        |
|    |                                                         | Solvabilitas Layanan                                       | 2,301,246.61 %                    |                 | 2,220,624.74 %                       |                 | 0.96 %                             |        | 2,301,246.61 % |                 | 96 %                       |        |
|    |                                                         | Solvabilitas Jangka Pendek                                 | 100 %                             |                 | 337.13 %                             |                 | 3.37 %                             |        | 100.00 %       |                 | 337 %                      |        |
|    |                                                         | Persentase Kemandirian Keuangan Daerah                     | 16 %                              |                 | 17.80 %                              |                 | 1.09 %                             |        | 16.31 %        |                 | 109 %                      |        |

| Persentase Penyerapan Anggaran Keuangan Daerah |                      |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| NO.                                            | INDIKATOR            | ANGGARAN             | REALISASI            | PERSENTASE PENYERAPAN |
| 1                                              | Belanja APBD TA 2025 | 2,613,805,620,536.12 | 2,492,180,637,365.00 | 95.35                 |

| Persentase Pengalokasian Anggaran Keuangan Daerah TA 2025                                                          |                     |                   |                      |                      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|
| URAIAN                                                                                                             | PAGU di DPA TA 2025 | APBD TA 2025      | PROSENTASE dari APBD | Nilai Target Standar | BOBOT | NILAI |
| Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan 20% dari APBD                                                                    | 804,138,911,521     | 2,613,805,620,536 | 30.77                | 20                   | 1     | 25.00 |
| Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan 10% dari APBD diluar Gaji                                                         | 580,764,629,228     | 2,613,805,620,536 | 22.22                | 10                   | 1     | 25.00 |
| Alokasi jumlah belanja Infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 40% dari Dana Transfer Umum | 633,980,873,614     | 2,108,856,369,536 | 30.06                | 25                   | 1     | 25.00 |
| Alokasi Belanja Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)                                                     | 225,418,126,918     | 2,613,805,620,536 | 8.62                 | 20                   | 1     | 12.30 |
| JUMLAH                                                                                                             | 2,244,302,541,281   |                   |                      |                      | 4.00  | 87.30 |



| Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah |                                                                       |           |             |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| NO.                                                 | DOKUMEN                                                               | INDIKATOR |             | Jumlah |
|                                                     |                                                                       | Nilai     | Keterukuran |        |
| 1                                                   | Informasi ringkasan dokumen RKPD                                      | 1         | 1           | 1      |
| 2                                                   | Informasi kebijakan umum anggaran                                     | 1         | 1           | 1      |
| 3                                                   | Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon                      | 1         | 1           | 1      |
| 4                                                   | Informasi ringkasan dokumen RKAS KPD                                  | 1         | 1           | 1      |
| 5                                                   | Informasi ringkasan dokumen RKAP PKD                                  | 1         | 1           | 1      |
| 6                                                   | Informasi ringkasan dokumen rancangan perda daerah                    | 1         | 1           | 1      |
| 7                                                   | Informasi peraturan daerah tentang APBD                               | 1         | 1           | 1      |
| 8                                                   | Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD             | 1         | 1           | 1      |
| 9                                                   | Informasi ringkasan DPAS KPD                                          | 1         | 1           | 1      |
| 10                                                  | Informasi DPAP PKD                                                    | 1         | 1           | 1      |
| 11                                                  | Informasi realisasi pendapatan daerah (Audited)                       | 0         | 0           | 0      |
| 12                                                  | Informasi realisasi belanja daerah (Audited)                          | 0         | 0           | 0      |
| 13                                                  | Informasi realisasi pembiayaan daerah (Audited)                       | 0         | 0           | 0      |
| 14                                                  | Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD                  | 1         | 1           | 1      |
| 15                                                  | Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD 2025                | 1         | 1           | 1      |
| 16                                                  | Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD   | 1         | 1           | 1      |
| 17                                                  | Informasi ringkasan RKAP perubahan TA 2025                            | 1         | 1           | 1      |
| 18                                                  | Informasi rencana umum pengadaan                                      | 1         | 1           | 1      |
| 19                                                  | Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah  | 1         | 1           | 1      |
| 20                                                  | Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi         | 1         | 1           | 1      |
| 21                                                  | Informasi laporan arus kas (AUDITED)                                  | 0         | 0           | 0      |
| 22                                                  | Informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD (AUDITED)           | 0         | 0           | 0      |
| 23                                                  | Informasi laporan realisasi anggaran PPKD (AUDITED)                   | 0         | 0           | 0      |
| 24                                                  | Informasi neraca (AUDITED)                                            | 0         | 0           | 0      |
| 25                                                  | Informasi CALK pemerintah daerah (AUDITED)                            | 0         | 0           | 0      |
| 26                                                  | Informasi laporan keuangan BUMD/ perusahaan daerah (AUDITED)          | 0         | 0           | 0      |
| 27                                                  | Informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah | 0         | 0           | 0      |
| 28                                                  | Informasi penetapan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD         | 0         | 0           | 0      |
| 29                                                  | Informasi Opini BPK                                                   | 0         | 0           | 0      |
| Jumlah Dokumen Yq Telah Di Publikasikan             |                                                                       |           |             | 17     |
| Jumlah Dokumen Yq Harus Di Publikasikan             |                                                                       |           |             | 29     |
|                                                     |                                                                       |           |             | 58.62  |

| Solvabilitas Layanan        |
|-----------------------------|
| Total Aset Tetap            |
| Jumlah Penduduk             |
| 2,687,488,891,333.29        |
| 1,210,240.00                |
| 2,220,624.74                |
| SOLVABILITAS JANGKA PANJANG |
| TOTAL ASSET TETAP           |
| Kewajiban Jangka Panjang    |
| 2,727,251,796,245.54        |
| 0                           |
| #DIV/0!                     |

| Solvabilitas Jangka Pendek |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| Kas dan Setara Kas         | + | Investasi Jk. Pendek |
| Kewajiban Lancar           |   |                      |
| 191,016,364,367.16         | + | -                    |
| 56,659,013,794.00          |   |                      |
| 191,016,364,367.16         | ÷ |                      |
| 56,659,013,794.00          |   |                      |
| 337.13                     |   |                      |



| Fleksibilitas Keuangan |                      |
|------------------------|----------------------|
| TOTAL PENDAPATAN       | DAK                  |
| Total Kewajiban        | Belanja Pegawai      |
| 2,510,468,212,820.44   | 375,418,642,446.00   |
| 59,901,995,014.96      | 1,086,155,532,740.00 |
|                        |                      |
|                        |                      |
|                        |                      |
|                        |                      |
|                        |                      |
|                        |                      |
| 2,135,049,570,374.44   |                      |
| 1,026,253,537,725.04   |                      |
| 2.08                   |                      |

| Solvabilitas Operasional |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| Total Pendapatan LO      | - | Pendapatan DAK LO  |
| Total Beban LO           |   |                    |
| 2,273,406,615,116.80     | - | 375,418,462,446.00 |
| 2,255,207,410,991.62     |   |                    |
| 1,897,988,152,670.80     |   |                    |
| 2,255,207,410,991.62     | ÷ |                    |
|                          |   |                    |
|                          |   |                    |
| 84.16                    |   |                    |

| Kondisi Keuangan Daerah (Realisasi) (TW4) |                  |                      |   |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|---|
|                                           |                  |                      |   |
| 1                                         | TOTAL PAD        | 443,698,952,337.77   | % |
| 2                                         | TOTAL PENDAPATAN | 2,492,823,448,535.00 | % |
|                                           |                  |                      |   |
|                                           |                  |                      |   |
|                                           |                  | 17.80                | % |